RENCANA KERJA (RENJA)
BADAN PENDAPATAN DAERAH
TAHUN 2024



PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK

LAMPIRAN XXVIII
PERATURAN BUPATI NGANJUK
NOMOR TAHUN 2024
TENTANG RENCANA KERJA BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN NGANJUK TAHUN 2024

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Berdasarkan Undang-undang No 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mengamanatkan Perangkat Daerah untuk menyusun Renja Perangkat Daerah sebagai pedoman kerja selama periode 1 (satu) tahun yang merupakan penjabaran dari perencanaan strategis lima tahunan yang dituangkan dalam Rencana Strategis Perangkat Daerah ke dalam perencanaan tahunan yang sifatnya lebih operasional. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah yang memuat program dan kegiatan yang diperlukan untuk mencapai sasaran pembangunan dalam periode 1 (satu) tahun.

Tahapan penyusunan Renja Perangkat Daerah sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Renja Perangkat Daerah, adalah meliputi:

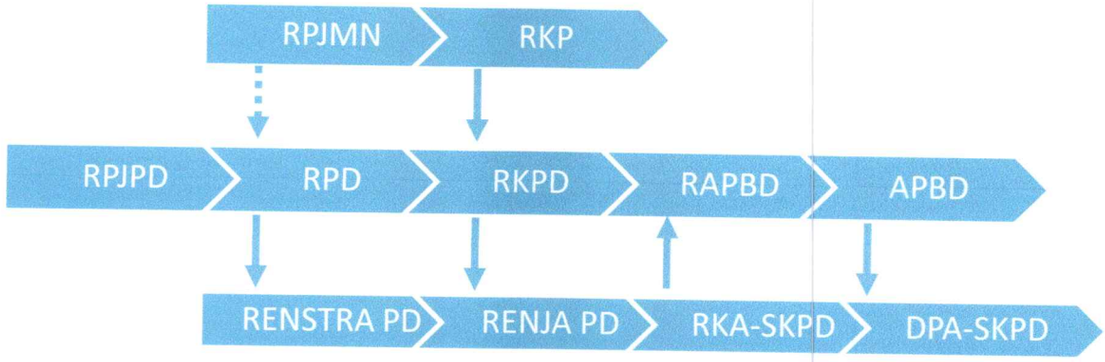
a. persiapan penyusunan;
b. penyusunan rancangan awal;
c. penyusunan rancangan
d. pelaksanaan forum Perangkat Daerah/lintas Perangkat Daerah;
e. perumusan rancangan akhir; dan

f. penetapan.

Sebagai dokumen perencanaan tahunan, Renja Perangkat Daerah mempunyai kedudukan strategis dalam kesinambungan perencanaan Perangkat Daerah dengan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD), sebagai implementasi pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) dan Renstra Perangkat Daerah yang menjadi satu kesatuan dalam upaya pencapaian Tujuan dan sasaran Daerah.

Gambar 1.

Diagram Keterkaitan Antara Dokumen Perencanaan dan Penganggaran



Keterangan:

diperhatikan

dipedomani dan/atau diacu

dipedomani dan/atau diacu

Sumber : Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 dan Permendagri Nomor 77 Tahun 2020

Rencana Kerja Perangkat Daerah disusun dengan mengacu pada kerangka arahan yang dirumuskan dalam rancangan awal RKPD serta didasarkan pada evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun sebelumnya dan evaluasi kinerja terhadap pencapaian Renstra Perangkat Daerah dan pada akhirnya Renja Perangkat Daerah digunakan sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD) untuk penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

1.2 Landasan Hukum

Dasar hukum penyusunan Renja Perangkat Daerah adalah:

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730)
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
4. Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan daerah;
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
6. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

7. Undang - Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
8. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
9. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang tata cara pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 Tentang Sinkronisasi Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6056);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
16. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan;
17. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2019 Tentang Percepatan Pembangunan Ekonomi Di Kawasan Gresik - Bangkalan - Mojokerto - Surabaya - Sidoarjo - Lamongan, Kawasan Bromo - Tengger - Semeru, Serta Kawasan Selingkar Wilis Dan Lintas Selatan;
18. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;
19. Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2020;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 tahun 2018;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 Tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023;
27. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tantang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
28. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 14 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Nganjuk Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2008 Nomor 04);
29. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 08 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 06 Tahun 2013;
30. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 2 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Nganjuk Tahun 2010-2030 (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2011 Nomor 05);
31. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 3 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 3 Tahun 2018;
32. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 8

Tahun 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2020 Nomor 8);

33. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor --- Tahun ---- tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2024-2026;
34. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2024.

1.3 Maksud dan Tujuan

1.3.1 Maksud

Penyusunan Renja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2024 dimaksudkan sebagai pedoman dan acuan dalam perencanaan program, kegiatan maupun perencanaan kebutuhan anggaran/pagu indikatif pada Perangkat Daerah dalam melaksanakan tugas dan fungsinya selama tahun 2024.

1.3.2 Tujuan

Tujuan Penyusunan Renja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2024 adalah:

a. Menetapkan prioritas dan sasaran, rencana program dan kegiatan, indikator dan target, serta pagu indikatif tahun 2024 yang tertuang dalam arahan kebijakan berdasarkan hasil analisis dari evaluasi kinerja pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2023;
b. Merumuskan suatu dokumen perencanaan sebagai penjabaran Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2024-2026 pada tahun ke-1 (ke-satu) periode tahun 2024; dan
c. Menjamin keterkaitan perencanaan, penganggaran, serta pelaksanaan program dan kegiatan selama tahun 2023.
d. Sebagai instrumen pengendalian dan evaluasi, serta pertanggungjawaban kinerja Perangkat Daerah Tahun 2024.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dokumen Renja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2024, disajikan sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang;
1.2. Landasan Hukum;
1.3. Maksud dan Tujuan; dan
1.4. Sistematika Penulisan.

BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN NGANJUK TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk;
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk;
2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan fungsi Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk;
2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD; dan
2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH KABUPATEN NGANJUK

3.1. Telaah Terhadap Kebijakan Nasional;
3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk; dan
3.3. Program dan Kegiatan.

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH KABUPATEN NGANJUK

BAB V PENUTUP

BAB II
HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

Pelaksanaan evaluasi Renja Perangkat Daerah sebagai salah satu fungsi untuk mengetahui capaian kinerja yang dilakukan oleh Perangkat Daerah melalui capain kinerja program/kegiatan sesuai dengan target kinerja yang ditetapkan dalam Renja Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2024 didasarkan pada Renstra Perangkat Daerah Tahun 2024-2026 dan RPJMD Kabupaten Nganjuk Tahun 2024-2026, untuk mengetahui:

1. Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program/kegiatan;
2. Implikasi yang kemungkinan berdampak pada target capaian program Renstra Perangkat Daerah; dan
3. Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab dimaksud.

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah.

Evaluasi hasil pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2022 dan perkiraan capaian tahun 2023 yang mengacu pada APBD Tahun Anggaran 2023, serta pencapaian Renstra Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2018-2023 berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun-tahun sebelumnya sebagaimana tabel berikut:

rusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun-2024	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan keluaran Kegiatan s/d 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2) 2021			Target Program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun n-1) 2023	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan 2022	
				Target Renja Perangkat Daerah Tahun (n-2) 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun(n-2) 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (n-1) 2023	Tingkat Capaian Realisasai Target Renstra (%)
2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan									
KEUANGAN									
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	**Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Pelayanan pajak daerah**	85 %	93.35 %	90 %	85 %	**94.44**	90 %	**268.35**	**3.16**
	Nilai Sakip SKPD	A (90)							
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	**Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi yang selesai**	13 dok	29 dok	13 dok	**33** Dokumen	**253.85**	12 Dokumen	**74.00**	**5.69**
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	**Dokumen Perencanaan, yang selesai**	**6** dok	**8** dok	**6** dok	10 Dokumen	**166.67**	**6** Dokumen	**24.00**	**4.00**

Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	**Dokumen Evaluasi yang selesai**	7 dok	21 dok	7 dok	23 Dokumen	**328.57**	6 Dokumen	**50.00**	**7.14**
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	**Laporan Keuangan yang selesai**	42 Dokumen	133 dok	42 dok	**41** Dokumen	**97.62**	75 Dokumen	**249.00**	**5.93**
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah pembayaran Gaji dan Tunjangan ASN	23 dokumen	78 dok	23 dok	16 Orang	**69.57**	45 Orang	**139.00**	**6.04**
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah laporan keuangan akhir tahun yang disusun	1 Laporan	1 lap	1 lap	1 Laporan	**100.00**	1 Laporan	**3.00**	**3.00**
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah laporan keuangan,bulanan,triwulan, semesteran Perangkat Daerah yang disusun	18 Laporan	54 lap	18 lap	24 Laporan	**133.33**	29 Laporan	**107.00**	**5.94**
Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	**Dokumen Administrasi Barang Milik Daerah yang dilaksanakan**	1 dok	1 dok	1 dok	1 Laporan	**100.00**	1 Laporan	**3.00**	**3.00**
Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah dokumen penatausahaan barang milik daerah	1 dok	1 dok	1 dok	1 Dokumen	**100.00**	1 Dokumen	**3.00**	**3.00**
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	**% ASN yang hadir dan pulang tepat waktu**	100 %	8 dok	8 dok	9 Dokumen	**112.50**	8 Dokumen	**25.00**	**0.25**
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta atributnya	48 Orang	48 orang	48 orang	44 Orang	**91.67**	48 Orang	**140.00**	**2.92**
Pendataan dan Pengolahan administrasi kepegawaian	Jumlah dokumen pendataan dan pengolahan administrasi kepegawaian	12 Dokumen	- lap	12 lap	9 Dokumen	**75.00**	12 Dokumen	**21.00**	**1.75**

	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah aparatur yang mengikuti pelatihan berdasarkan tugas dan fungsi	44 Orang	- org	2 org	0 Orang	-	44 Orang	**44.00**	**1.00**
Administrasi Umum Perangkat Daerah		**Jumlah Laporan administrasi umum yang dilaksnakan**	12 Laporan	10 bk	10 bk	9 Laporan	**90.00**	12 Laporan	**31.00**	**2.58**
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	90 Paket						-	-
	Penyediaan Komponen alat listrik/penerangan bangunan kantor			148 paket	10 Paket	**21** Paket	**210.00**	10 Paket	**179.00**	
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				10 Paket	**10** Paket	**100.00**	10 bh	**20.00**	
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	jumlah paket bahan logistik Kantor Bapenda	60 Paket	3,320 Paket	60 Paket	**40** Paket	**66.67**	60 Paket	**3,420.00**	**57.00**
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	118,096 paket	333,000 paket	118,096 paket	**119,760** paket	**101.41**	115,000 paket	**567,760.00**	**4.81**
									-	
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah bahan bacaan yang tersedia	1,120 Exl	2,520 exl	1,120 Exl	816 Exl	**72.86**	1,080 Exl	**4,416.00**	**3.94**
	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	36 Laporan	12 Laporan	9 Laporan	**75.00**	12 Laporan	**57.00**	**4.75**
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan	12 Laporan	36 Laporan	12 Laporan	9 Laporan	**75.00**	12 Laporan	**57.00**	**4.75**

	Konsultasi SKPD								
Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	12 Dokumen	36 Dokumen	12 Dokumen	9 Dokumen	**75.00**	12 Dokumen	**57.00**	**4.75**
Dukungan pelaksanaan sistem pemerintah berbasis Elektronik Pada SKPD	Jumlah Laporan Perkembangan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah	4 Laporan	- Laporan	1 Laporan	1 laporan	**100.00**		**1.00**	**0.25**
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	**Jumlah pengadaan Barang Milik Daerah yang diadakan**	10 unit	31 unit	20 unit	20 unit	**100.00**	11 unit	**62.00**	**6.20**
Pengadaan Kendaaan dinas operasional atau lapangan	Jumlah unit Kendaaan dinas operasional atau lapangan yg disediakan		1 krnd					**1.00**	
Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit kendaraan dinas operasional atau lapangan yang disediakan	**1** unit	-				Unit	**-**	**-**
Pengadaan Mebel	Jumlah mebeleur yang diadakan	20 unit meja/kursi	10				Unit	**10.00**	**0.50**
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah pengadaan peralatan dan mesin kantor yang di adakan	10 unt	20 unit	17 Unit	20 Unit	**117.65**	16 Unit	**56.00**	**5.60**
Pengadaan Aset tak berwujud	Jumlah unit aset tak berwujud yang disediakan		-					**-**	
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Jumlah Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dilaksanakan**	3 jasa	3 jasa	3 Jasa	3 Jasa	**100.00**	3 Jasa	**9.00**	**3.00**
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	36 Laporan	12 Laporan	9 Laporan	**75.00**	12 Laporan	**57.00**	**4.75**

Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	36 Laporan	12 Laporan	9 Laporan	**75.00**	12 Laporan	**57.00**	**4.75**
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	36 Laporan	12 Laporan	9 Laporan	**75.00**	12 Laporan	**57.00**	**4.75**
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Barang Milik Daerah yang dipelihara**	52 unit	157 unit	52 unit	45 unit	**86.54**	52 unit	**254.00**	**4.88**
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan dinas yang terpelihara	19 unit	36 unit	19 unit	19 unit	**100.00**	19 unit	**74.00**	**3.89**
Pemeliharaan Mebel	Jumlah Meubeleur yang dipelihara	10 unit	15 unt	10 unit	0 unit	-	17 unit	**32.00**	**3.20**
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipeliharat	22 unit	105 unit	22 unit	25 unit	**113.64**	25 unit	**155.00**	**7.05**
Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor yangterpelihara	1 gedung	1 gedung	1 gedung	1 gedung	**100.00**	1 gedung	**3.00**	**3.00**
PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Prosesntase Kenaikan PAD								
	Jumlah Wajib Pajak yang membayar tepat Waktu	667,000.00 WP							
	Jumlah Wajib Pajak Baru	2,000.00 WP							
	Prosentase Realisasi Pajak Daerah	100.00 %							

	Prosentase Realisasi Retribusi Daerah yang dikelola	% 100.00							
Pengelolaan pendapatan Daerah	Prosesntase Kenaikan PAD								
	Jumlah Wajib Pajak yang membayar tepat Waktu	WP 667,000.00							
	Jumlah Wajib Pajak Baru	WP 2,000.00							
	Prosentase Realisasi Pajak Daerah	% 100.00							
	Prosentase Realisasi Retribusi Daerah yang dikelola	% 100.00							
Perencanaan pengelolaan pajak daerah	Jumlah Perencanaan pengelolaan pajak daerah yang dilaksanakan	Dokumen 3	Dokumen 9	3 Dokumen	3 Dokumen	**100.00**	Dokumen 3	**15.00**	**5.00**
Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Analis Pajak Daerah serta Pengembangan Pajak Daerah dan Kebijakan Pajak Daerah	Dokumen 1	-		Dokumen		Dokumen 1	**1.00**	**1.00**
Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Laporan 12	Laporan 36	8 Laporan	8 Laporan	**100.00**	Laporan 2	**46.00**	**3.83**
Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	Jenis 25	jenis 75	25 Jenis	25 Jenis	**100.00**	Jenis 25	**125.00**	**5.00**

Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subjek Pajak dan Wajib Pajak Daerah	12 Laporan	36 Laporan	12 Laporan	9 Laporan	**75.00**	12 Laporan	**57.00**	**4.75**
Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	2 Laporan	3 laporan	2 Laporan	3 Laporan	**150.00**	2 Laporan	**8.00**	**4.00**
Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	Jumlah Objek Pajak yang Disesuaikan NJOP nya	3,000 OP	8,967 OP	3000 OP	750 OP	**25.00**	6,250 OP	**15,967.00**	**5.32**
Penetapan Wajib Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah	24 Dokumen	72 Dokumen	24 Dokumen	18 Dokumen	**75.00**	24 Dokumen	**114.00**	**4.75**
Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Jumlah Layanan dan Konsultasi Pajak Daerah	35,000 Layanan	18,674 Layanan	2 Layanan	2 Layanan	**100.00**	35,000 Layanan	**53,676.00**	**1.53**
Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	Jumlah Data Pelaporan Pajak Daerah yang Telah Dilakukan Penelitian dan Verifikasi	12 Dokumen	36 Dokumen	12 Dokumen	9 Dokumen	**75.00**	12 Dokumen	**57.00**	**4.75**
Penagihan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penagihan Pajak Daerah	12 Dokumen	36 Dokumen	12 Dokumen	9 Dokumen	**75.00**	12 Dokumen	**57.00**	**4.75**
Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	12 Dokumen	36 Dokumen	12 Dokumen	9 Dokumen	**75.00**	9 Dokumen	**54.00**	**4.50**

Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pemeriksaan serta Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah	12 Dokumen	36 Dokumen	12 Dokumen	9 Dokumen	**75.00**	12 Dokumen	**57.00**	**4.75**
Pembinaan dan pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah	12 Dokumen	-				3 laporan	**3.00**	**0.25**
Elektronifikasi Transaksi Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Perkembangan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah	12 laporan	-				4 laporan	**4.00**	**0.33**

Untuk menilai keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan daerah diukur berdasarkan capaian kinerja masing-masing indikator program dan kegiatan atas perbandingan realisasi kinerja dengan target kinerja menggunakan skala ordinal sebagai berikut:

Tabel 2.3
Kategorisasi Capaian Kinerja

Nilai	Kategori	Warna	Notifikasi
≥ 80%	Tercapai	Hijau	
60% - 79%	Kurang Tercapai	Kuning	
≤ 59%	Tidak Tercapai	Merah	

Berdasarkan rekapitulasi evaluasi hasil pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2022 dapat dianalisis faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebih target kinerja, implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra Perangkat Daerah, serta kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut, sebagaimana tabel berikut:

Tabel 2.4
Analisis Faktor Penyebab, Implikasi serta Kebijakan Perencanaan dan Penganggaran

Program (Renstra Perangkat Daerah)	Program (Kepmendagri Nomor 050-3708 Tahun 2020)	Notifikasi
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	
Program Pengelolaan Pendapatan	Program Pengelolaan Pendapatan	
Faktor Penyebab	Implikasi Terhadap Target Renstra PD	Kebijakan Yang Diambil
1. Adanya wabah covid	Terdapat risiko kurang tercapainya target kinerja	1. Memberikan insentif pengurangan pajak berdasarkan Surat Edaran Bupati Nomor 900/1086/411.403/2020 tentang pemberian Insentif berupa pengurangan Pajak daerah dan Retribusi Daerah bagi Pemilik Usaha dan Pembebasan Denda PBB P2
2. Kurangnya kesadaran Wajib Pajak/Wajib Retribusi dan Wajib Pungut terhadap kewajiban perpajakan	- Penerimaan Pajak Kurang Optimal tidak sesuai omzet	2. Memberikan penyuluhan ke wajib Pajak
3. Kurangnya kuantitas & kualitas SDM	- Pelaksanaan Tupoksi Kurang Optimal	3. Mengusulkan sdm untuk mengikuti Bintek Pemeriksa Pajak, Analis Pajak, Juru sita
4. Masih adanya piutang pajak	- Piutang Pajak Semakin meningkat	4. Menyusun TIM Penyelesaian Piutang Pajak
5. Terbatasnya Channel Pembayaran	- Wajib Pajak tidak punya pilihan berupa pembayaran	5. Penambahan Channel Pembayaran Pajak dengan Melaksanakan kerja Sama dengan Bank selain Bank

		Jatim
6. Pembayaran Pajak Tunai	- Pengelolaan Pajak Kurang Optimal	6. Pelaksanaan Pelayanan Pajak secara Online dan pembayaran secara Non Tunai

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Capaian kinerja pelayanan Badan Pendapatan Daerah sesuai Tugas dan Fungsi Badan Pendapatan Daerah dapat dilihat dari Realisasi Pendapatan Asli Daerah selama 5 (lima) Tahun atau Tahun 2018 s/d 2022 sebagai berikut :

Target dan Realisasi Pendapatan Tahun 2018 sampai dengan bulan Desember 2022

NO	URAIAN	TA 2022			TA 2021			TA 2020		
		TARGET	REALISASI	%	TARGET	REALISASI	%	TARGET	REALISASI	%
1.	Pendapatan Asli Daerah	384.183.486.327,00	445.589.935.500,99	115,98	315.186.642.787,00	446.657.405.603,24	141,71	323.260.574.754,39	402.347.144.361,43	124,47
2.	Pendapatan Dana perimbangan	1.910.407.441.736,00	1.906.100.240.092,00	99,77	1.975.606.394.507,00	2.020.931.609.297,00	102.29	1.435.075.828.974,00	1.441.047.387.801,00	100,42
3.	Lain-lain pendapatan yang Sah	158.374.778.203,00	149.506.602.026,00	94,40	153.619.634.880,00	140.849.066.601,00	91,69	577.249.296.676,00	592.002.425.917,00	102,56
JUMLAH PENDAPATAN DAERAH		***2.452.965.706.266,00***	***2.501.196.777.618,99***	102,00	***2.444.412.672.174,00***	***2.608.438.081.501,24***	106,62	***2.335.585.700.404,39***	***2.435.129.246.169,38***	**104,26**

**TA 2022 Data Belum Audit BPK*

NO	URAIAN	TA 2019			TA 2018		
		TARGET	*REALISASI*	%	TARGET	REALISASI	%
1.	Pendapatan Asli Daerah	*357.367.538.593,08*	*368.272.236.478,28*	*109,82*	*345.138.632.616,31*	*361.586.738.454,12*	*104,77*
2.	Pendapatan Dana perimbangan	*1.577.411.729.591,00*	*1.556.827.334.981,00*	*98,70*	*1.880.567.716.243,00*	*1.908.660.913.943,00*	*101,49*
3.	Lain-lain pendapatan yang Sah	*535.289.234.000,00*	*587.877.946.896,00*	*55,87*	*99.738.600.000,00*	*99.922.385.400,00*	*100,18*
JUMLAH PENDAPATAN DAERAH		***2.470.068.502.184,08***	***2.512.977.518.355,28***	***101,74***	***2.325.444.948.859,31***	***2.370.170.037.797,12***	***101,92***

Capaian kinerja pelayanan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Nganjuk berdasarkan Indikator Kinerja Kunci (IKK) yang sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, serta target kinerja pelayanan dasar sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal, serta Indikator Kinerja Utama (IKU) sesuai dengan bisnis utama *(core bussiness)* dan Perda Kabupaten Nganjuk Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2018-2023. Cara menentukan tolok ukur kinerja dan indikator kinerja pelayanan pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Nganjuk adalah sesuai dengan tugas pokok dan fungsi menggunakan tolok ukur dan indikator kinerja sesuai dengan Rencana Strategis Bapenda Kabupaten Nganjuk Tahun 2018-2023 yaitu :

- Prosentase PAD terhadap Pendapatan.
- Prosentase Kenaikan PAD

Hasil Analisis pencapaian Kinerja pelayanan Perangkat Daerah dapat dilihat di Tabel T-C 30 sebagai berikut

Tabel T-C.30

Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah BAPENDA

Kabupaten Nganjuk

No	Indikator	Target Renstra Perangkat Daerah (%)				Realisasi		capaian	
		Tahun N-3 (2020)	Tahun N-2 (2021)	Tahun N-1 (2022)	Tahun N (2023)	Tahun N-3 (2021)	Tahun N-2 (2022)	Tahun N - 1 (2021)	Tahun N (2022)
1	2	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Prosentase PAD Terhadap Pendapatan	14,80	16,60	16,70	16,75	18,34	17,82	110,50	106,68
2	Prosentase kenaikan Pendapatan Asli daerah	5,20	8.00	8,25	8,50	11,01	(0,24)	137,66	(1,43)

Berdasarkan Tabel TC-30 dapat diuraiakan sebagai berikut : kinerja berdasarkan tujuan dan sasaran yang tercantum dalam Reviu Renstra Badan Pendapatan Daerah Kabupaten NganjukTahun 2018-2023 yaitu :

- Tujuannya ***Meningkatnya Kemampuan Pengelolaan Pendapatan Daerah***", dengan indikator *Prosentase PAD terhadap Pendapatan dapat dijelaskan sebagai berikut* :

  Pada tahun 2022 Target kinerja 16,70 % Realisasi 18,05 % jadi capaian kinerja 108,09 %

  Hal ini dapat dihitung Prosentase Pendapatan Asli Daerah terhadap pendapatan dengan rumus Realisasi PAD Tahun Berjalan dibagi Realisasi Pendapatan Tahun berjalan dikali 100 persen, maka realisasi indikator kinerja prosentase PAD Terhadap Pendapatan tahun 2022 mencapai realisasi 18,07% dari target 16,70% sehingga capaian kinerja sebesar 108,20% dengan perhitungan :

- Realisasi PAD Tahun 2022	Rp.	445.589.935.500,99
- Realisasi Pendapatan 2022	Rp.	2.501.196.777.618,99
- Realisasi Prosentase PAD Terhadap Pendapatan		17,82%
- Target Kinerja Tahun 2022 sebesar		16,70%
- Capaian kinerja		106.68%

- *Sasaran Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah* dengan Indikator *Prosentase peningkatan PAD* yang rumusan perhitungannya adalah Realisasi PAD Tahun berjalan dikurangi realisasi PAD Tahun lalu dibanding Realisasi PAD Tahun lalu dikali 100%.

  Pada tahun 2022 Target kinerja 8,25%, realisasi pada Tahun 2022 mencapai (0,24 %) sehingga capaian kinerja menurun 1,43%, dengan perhitungan sebagai berikut :

- *Realisasi PAD Tahun 2022*	*Rp*	*445.589.935.500,99*
- *Realisasi PAD Tahun 2021*	*Rp*	*446.657.405.603,24*
- *Menurun*	*Rp*	*1.067.470.102,25*
- *Realisasi Prosentase PAD menurun*		*(0,24%)*
- *Capaia kinerja*		*(1,43%)*

  Berdasarkan perhitungan tersebut capaian kinerja Prosentase kenaikan pendapatan asli daerah Tahun 2022 *tidak tercapai* menurun sebesar (1,43%). Hal ini dikarenakan menurunnya penerimaan BLUD RSD yang pada tahun 2021 ada penerimaan untuk penanganan covid-19 sedangkan pada tahun 2022 untuk penerimaan penanganan covid berkurang.

Pencapaian Indikator tujuan dan sasaran tersebut dikarenakan:

1. adanya pemasangan alat perekam pajak online dan kunjungan maintance/monitoring secara berkala,
2. adanya tempat pembayaran selain Bank Jatim yaitu Bank Mandiri, BNI dan Kantor Pos,
3. meningkatnya kesadaran beberapa Wajib Pungut Hotel yang menyetor Pajak sesuai Omzetnya
4. Sosialisasi Sistem E-SPTPD untuk pengelolaan Pajak selain PBB dan BPHTB
5. optimalisasi pelayanan BPHTB yang telah menggunakan Sistem E BPHTB secara online sehingga memudahkan proses BPHTB mulai dari Pendaftaran sampai dengan penetapan pajaknya.
6. adanya pemasangan papan Reklame yang disewa oleh pihak ketiga dan juga karena adanya pemasangan papan reklame baru.
7. Pembayaran Pajak secara non tunai

Visi Kabupatan Nganjuk yang tertuang dalam RPD Kabupaten Nganjuk Tahun 2024-2026 adalah **NGANJUK YANG MAJU, ADIL DAN SEJAHTERA**", dan dijabarkan dalam **MISI KE 4** sebagai berikut:

Mewujudkan masyarakat yang demokratis, berlandaskan hukum yang didukung oleh profesionalisme aparatur, adalah memantapkan kelembagaan demokrasi yang lebih kokoh; memperkuat peran masyarakat sipil; memperkuat kualitas desentralisasi dan otonomi daerah; menjamin pengembangan media dan kebebasan media dalam menkomunikasikan kepentingan masyarakat; dan melakukan pembenahan struktur hukum dan meningkatkan budaya hukum dan menegakkan hukum secara adil, konsekuen, tidak diskriminatif, dan memihak pada rakyat kecil, memantapkan reformasi birokrasi menuju profesionalisme aparatur dalam memberikan pelayanan publik dengan memperhatikan prinsip-prinsip tata kepemerintahan yang baik.

Dalam pencapaian Visi dan Misi Kabupaten Nganjuk, (Perangkat Daerah) memberikan kontribusi dalam pencapaian Misi ke-4.

Dalam pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal beberapa hal yang perlu mendapat perhatian adalah:

1. Standar Pelayanan : Merupakan komponen setiap produk layanan yang berisi persyaratan, biaya, jangka waktu penyelesaian dan prosedur (permenpan Nomor 15 Tahun 2014)

2. Maklumat layanan : Berupa penyataan tertulis dari penyelenggara layanan terkait kesediaan melayani dan menerima penyelesaian, apabila melanggar;
3. Pengelola Pengaduan : Mencermati ketersediaan sarana pengaduan, pelaksana pengelola pengadua dan informasi tata cara pengaduan..
4. Sarana dan prasarana Fasilitasi : merupakan sarana dasar dalam pelayanan seperti meja layanan, ruang tunggu dan toilet;
5. Pelayanan Khusus : Ketersediaan saraba pelayanan khusus yang berfungsi mengakomodasi kebutuhan ibu hamil, lansia dan pengguna layanan yang berkebutuhan khusus pada saat mengakses layanan;
6. Penilaian kepuasan masyarakat : merupakan instrument pengumpul data terkait kepuasan pengguna layanan;
7. Visi, Misi dan Moto Pelayanan : merupakan penjabaran dari rencana strategis penyelenggara layanan yang termanifestasi hingga unit layanan;
8. Atribut : Tanda pengenal/ID Card setiap pelaksana layanan agar terhindar dari Calo;
9. Pelayanan Terpadu : Pelayanan terpadu satu pintu

Dengan dicanangkannya program Tujuan Pembangunan Berkelanjutan di Indonesia sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2017, Pemerintah Kabupaten Nganjuk telah melaksanakan program pencapaian 17 Tujuan TPB dan mengintegrasikan dalam dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah daerah. Secara keseluruhan 17 Tujuan TPB tersebut adalah sebagai berikut:

1. Mengakhiri segala bentuk kemiskinan dimanapun.
2. Mengakhiri kelaparan, mencapai ketahanan pangan, meningkatkan gizi, dan mendorong pertanian yangberkelanjutan.
3. Menjamin kehidupan yang sehat serta mendorong kesejahteraan bagi seluruh orang di segala usia.
4. Menjamin pendidikan yang inklusif dan berkeadilan serta mendorong kesempatan belajar seumur hidup bagi setiap orang.
5. Menjamin kesetaraan gender serta memberdayakan seluruh perempuan.
6. Menjamin ketersediaan dan pengelolaan air serta sanitasi yang berkelanjutan bagi seluruh orang.
7. Menjamin akses energi yang terjangkau, terjamin, berkelanjutan serta modern bagi semua orang.

8. Mendorong pertumbuhan ekonomi yang terus-menerus, inklusif, dan berkelanjutan, serta kesempatan kerja penuh, produktif dan pekerjaan yang layak bagi semua orang.
9. Membangun infrastruktur yang berketahanan, mendorong industrialisasi yang inklusif dan berkelanjutan serta membina inovasi.
10. Mengurangi kesenjangan di dalam dan di antaranegara.
11. Menjadikan kota dan pemukiman manusia inklusif, berketahanan, aman dan berkelanjutan.
12. Menjamin pola produksi dan konsumsi yang berkelanjutan.
13. Mengambil tindakan segera untuk memerangi perubahan iklim serta dampaknya.
14. Melestarikan dan menggunakan samudera, lautan dan sumber daya lautsecara berkelanjutan untuk pembangunan berkelanjutan.
15. Melindungi, memperbarui, dan mendorong pemakaian ekosistem daratan yang berkelanjutan, mengelola hutan secara berkelanjutan, memerangi penggurunan, menghentikan dan memulihkan degradasi tanah, serta menghentikan kerugian keanekaragaman hayati.
16. Mendorong masyarakat yang damai dan inklusif untuk pembangunan berkelanjutan, menyediakan akses keadilan bagi semua orang, serta membangun institusi yang efektif, akuntabel, dan inklusif di seluruh tingkatan.
17. Memperkuat perangkat-perangkat implementasi *(means of implementation)* dan merevitalisasi kemitraan global untuk pembangunan berkelanjutan.

Guna mendukung tercapainyanya tujuan dan sasaran Badan Pendapatan Daerah didukung dengan pendanaan dari APBD Tahun Anggaran 2022 dan berdasarkan Peraturan Bupati Nganjuk NO 18 Tahun 2021 Tentang Perubahan Peraturan Bupati Nganjuk No 58 Th 2020 tentang Penjabaran APBD TA 2021 Anggaran Belanja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten mengalami Perubahan sebagaimana tabel berikut:

Realisasi Anggaran Belanja Bapenda Kabupaten Nganjuk Tahun Anggaran 2022 S/D TANGGAL 30 Desember 2022 sebagaimana tabel berikut :

No.	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Sisa Anggaran
1	2	3	4	5	6	7	8
A	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH**			**13,483,792,551**	**11,962,709,490**	**88.72**	**1,521,083,061**
I		**Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**		**22,208,000**	**20,482,250**	**92.23**	**1,725,750**
1			Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	7,000,000	6,764,250	96.63	**235,750**
2			Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	15,208,000	13,718,000	90.20	1,490,000
II		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**		**9,729,320,000**	**8,529,058,066**	**87.66**	1,200,261,934
1			Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	9,673,820,000	8,476,913,816	87.63	1,196,906,184
2			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	5,500,000	5,163,000	93.87	337,000
3			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	50,000,000	46,981,250	93.96	3,018,750
III		**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat**		**16,058,000**	**14,538,800**	**90.54**	1,519,200

		Daerah					
1			Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	16,058,000	14,538,800	90.54	1,519,200
IV		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**		**248,169,800**	**217,568,596**	**87.67**	30,601,204
1			Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	34,140,000	31,693,500	92.83	2,446,500
2			Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	5,000,000	4,701,650	94.03	298,350
3			Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	209,029,800	181,173,446	86.67	27,856,354
V		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**		**811,756,600**	**733,421,499**	**90.35**	78,335,101
1			Penyediaan Komponen alat listrik/penerangan bangunan kantor	7,924,000	7,520,000	94.90	404,000
2			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	7,931,150	5,743,555	72.42	2,187,595
3			Penyediaan Bahan Logistik Kantor	113,204,000	110,813,730	97.89	2,390,270
4			Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	56,810,650	54,146,700	95.31	20,349,300

5			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	3,700,000	3,240,000	87.57	460,000
6			Fasilitasi Kunjungan Tamu	9,999,400	9,081,328	90.82	918,072
7			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	171,316,000	138,642,586	80.93	32,673,414
8			Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	90,876,250	86,897,100	95.62	3,979,150
9			Dukungan Pelaksanaan sistem pemerintah berbasis Elektronik pada SKPD	349,995,150	317,336,500	90.67	32,658,650
VI		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**		**1,520,193,651**	**1,465,287,230**	**96.39**	**54,906,421**
1			Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	1,520,193,651	1,465,287,230	96.39	54,906,421
VII		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**		**689,184,000**	**643,302,260**	**93.34**	45,881,740
1			Penyediaan Jasa Surat Menyurat	3,000,000	2,988,400	99.61	11,600
2			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	204,984,000	179,783,040	87.71	25,200,960

3			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	481,200,000	460,530,820	95.70	20,669,180
VIII		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**		**446,902,500**	**339,050,789**	**75.87**	107,851,711
1			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	204,402,500	139,044,027	68.02	65,358,473
2			Pemeliharaan Mebel	2,500,000	2,500,000	100.00	-
3			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	160,000,000	128,499,420	80.31	31,500,580
4			Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	80,000,000	69,007,342	86.26	10,992,658
B	**PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH**			**3,031,982,100**	**2,399,541,771**	**79.14**	**632,440,329**
I		**Pengelolaan pendapatan Daerah**		**3,031,982,100**	**2,399,541,771**	**79.14**	**632,440,329**
1			Perencanaan pengelolaan pajak daerah	220,000,000	172,267,030	78.30	201,259,000
2			Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	273,215,000	236,050,100	86.40	85,804,900

3			Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	380,000,000	376,049,370	98.96	455,582,000
4			Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	150,000,000	122,230,290	81.49	161,936,000
5			Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	270,000,000	251,283,750	93.07	74,243,850
6			Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	100,000,000	44,442,400	44.44	134,747,300
7			Penetapan Wajib Pajak Daerah	200,000,000	116,266,760	58.13	116,464,020
8			Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	102,467,000	81,894,075	79.92	73,897,425
9			Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	830,000,100	672,967,090	81.08	757,002,690
10			Penagihan Pajak Daerah	350,000,000	255,898,156	73.11	263,336,205
11			Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	50,000,000	30,630,450	61.26	39,871,200

12			Pengendalian, pemeriksaan dan Pengawasan pajak Daerah	106,300,000	39,562,300	37.22	33,787,500
			Jumlah	16,515,774,651	14,362,251,261	86.96	10,422,966,163

Berdasarkan tabel tersebut diatas Realisasi capaian Anggaran Keuangan dan Kinerja dapat dijelaskan sebagai berikut :

Realisasi Anggaran Belanja Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp. **14,362,251,261** dari Anggaran sebesar Rp.16.515.774.651,00 atau 86,96%.

Adapun realisasi capaian kinerja Keuangan Tahun Anggaran 2022 sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

   Indikator capaian Program Hasil Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) target 90% realisasi 85,03% sehingga capaian kinerja 94,47%. Dan penyerapan Anggaran sebesar Rp. 11.962.709.490,00 atau 88,72% dari anggaran Rp. 13.483.792.551,00.

   Program Penunjang Urusan Pemerintah daerah Kabupaten/Kota terdiri dari 8 Kegiatan dan 26 Sub Kegiatan sebagai berikut :

   1.1 Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.

   Indikator Kegiatan ini yaitu Jumlah dokumen Perencanaan dan Dokumen laporan Evaluasi Kinerja dengan target kinerja 13 dokumen realisasi 17 Dokumen sehingga capaian kinerja 130,76%. Target dan realisasi capaian kinerja Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah sebagai berikut :

NO	URAIAN	TARGET	REALISASI	%
1	Renja	2 Dokumen	2 Dokumen	100
2	RKA	2 Dokumen	2 Dokumen	100
3	DPA	2 Dokumen	2 Dokumen	100
4	Manajemen Resiko	0 Dokumen	1 Dokumen	
5	LKJiP	1 Dokumen	1 Dokumen	100
6	LKPJ	1 Dokumen	1 Dokumen	100
7	LPPD	1 Dokumen	1 Dokumen	100
8	Evaluasi tribulan	3 Dokumen	4 Dokumen	133.33
19	Evaluasi Internal	1 Dokumen	3 Dokumen	100
	Jumlah	13 Dokumen	17 Dokumen	130.77

Sedangkan untuk Realisasi Anggaran sebesar Rp.20.842.250 atau 92,23% dari target sebesar Rp.22.208.000,-. Kegiatan ini terdiri dari :

1.1.1 Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah, indikator Jumlah Dokumen yang disusun dengan target 6 dokumen realisasi 9 dokumen capaian 150 %, realisasi anggaran Rp.6.764.250,00 atau 96,63% dari target anggaran sebesar Rp.7.000.000,00

1.1.2 Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, indikator jumlah dokumen yang disusun dengan target 7 dokumen realisasi 7 dokumen capaian 100% realisasi anggaran Rp.13.718.000,00 atau 90,20% dari target anggaran sebesar Rp.15.208.000,00

1.2 Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah.

Indikator kegiatan ini yaitu Jumlah dokumen Keuangan yang selesai dengan target 42 dokumem realisasi 41 dokumen, sehingga capaian kinerja tercapai 97,61%, sedangkan untuk Realisasi Anggaran sebesar Rp.8.529.058.066,- atau 87,66% dari target anggaran sebesar Rp.9.729.320.000,- kegiatan ini terdiri dari :

1.2.1 Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN, Indikator Jumlah Pelaksanaan Pembayaran Gaji sebanyak 12 bulan dengan capaian 100%, realisasi anggaran sebesar Rp. 8.476.913.816 atau 87,47% dari target anggaran sebesar Rp.9.673.820.000,-

1.2.2 Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD, Indikator Jumlah Laporan Keuangan yang disusun

sebanyak 1 Laporan yaitu Laporan Keuangan SKPD Tahun 2022 dengan realisasi anggaran sebesar Rp.5.163.000,- atau 93,87% dari target anggaran sebesar Rp. 5.500.000,-

1.2.3 Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD, Indikator jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semester dengan target 18 Laporan realisasi 24 Laporan dengan capaian 133,33%, realisasi anggaran Rp. 46.981.250,00 dari target anggaran sebesar Rp.50.000.000,- sehingga mencapai 93,96%

1.3 Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah.

Indikator Jumlah dokumen Penatausahaan Barang Milik Daerah terealisasi 100% dari target kinerja 1 dokumen dan untuk capaian kinerja dan untuk realisasi anggaran sebesar Rp.14.538.8000,- atau 90,54% dari target anggaran sebesar Rp.16.058.000,- kegiatan ini mempunyai 1 sub kegiatan yaitu Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD.

1.4 Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah.

Indikator jumlah Laporan administrasi umum dengan target kinerja 12 laporan, realisasi 11 laporan sehingga capaian 91,66%, realisasi anggaran sebesar Rp.733.421.499,- atau 90,35% dari target anggaran sebesar Rp.811.756.600, kegiatan ini terdiri dari :

1.4.1 Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor, Indikator jumlah komponen listrik yang tersedia dengan target kinerja 10 paket, realisasi 21sehingga capaian kinerja 210% dan untuk realisasi anggaran sebesar Rp.7.520.000,- atau 94,90% dari target anggaran sebesar Rp.7.924.000,-

1.4.2 Sub Kegiatan Penyediaan peralatan rumah tangga, Indikator Jumlah Peralatan rumah tangga yang tersedia dengan target kinerja 10 paket, realisasi 10 paket, sehingga capaian kinerja 100 dan untuk realisasi anggaran sebesar Rp.5.743.555,- atau 72,42% dari target anggaran sebesar Rp.7.931.150,-

1.4.3 Sub Kegiatan Penyediaan bahan logistik kantor, Indikator jumlah logistik kantor yang tersedia, dengan target 60 paket, terealisasi 55%, sehingga capaian kinerja 91,66% dan untuk realisasi anggaran sebesar Rp.110.813.730,- atau 97,89% dari target anggaran sebesar Rp. 113.204.000,-

1.4.4 Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan, Indikator jumlah barang cetakan dan barang fotocopy yang tersedia dengan target kinerja 118.096 lembar barang cetakan/penggandaan, terealisasi 119.760, sehingga capaian kinerja 101,40% dan untuk realisasi anggaran sebesar Rp.54.146.700,- atau 95,31% dari target anggaran sebesar Rp.56.810.650,-

1.4.5 Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan, Indikator jumlah bahan bacaan yang tersedia dengan target kinerja 1120 exemplar, terealisasi 1.080 exl, sehingga capaian kinerja 96,42 % dan untuk realisasi anggaran sebesar Rp.3.240.000 atau 87,57% dari target anggaran sebesar Rp.3.700.000,-

1.4.6 Sub Kegiatan Fasilitas Kunjungan Tamu, Indikator jumlah laporan fasilitas tamu dengan target kinerja 12 laporan terealisasi 12 laporan sehingga capaian kinerja 100 % dan untuk realisasi anggaran sebesar Rp.*.081.328,- atau 90,82% dari target anggaran sebesar Rp.9.999.400,-

1.4.7 Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD, Indikator jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi dengan target kinerja 12 laporan terealisasi 12 laporan sehingga capaian kinerja 100 % dan untuk realisasi anggaran Rp.138.642.586,- atau 80,93% dari target anggaran sebesar Rp.171.316.000,-

1.4.8 Sub Kegiatan Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD, Indikator jumlah penatausahaan arsip dinamis dengan target kinerja 12 dokumen terealisasi 12 dokumen sehingga capaian kinerja 100 % dan untuk realisasi anggaran sebesar Rp.86.897.100,- atau 95,62% dari target anggaran sebesar Rp.90.876.250,-

1.4.9 Sub Kegiatan Dukungan Pelaksanaan system pemerintah berbasis Elektronik pada SKPD, indikator Jumlah Laporan Perkembangan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah dengan target kinerja 1 laporan terealisai 1 Laporan sehingga capaian kinerja 100% dan untuk realisasi anggaran sebesar Rp.317.336.500- atau 90,67% dari target anggaran sebesar Rp.349.995.150,-

1.5 Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah.

Indikator Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang diadakan dengan target kinerja 17 terealisasi 50 unit sehingga capaian kinerja 100% dan untuk anggaran sebesar Rp.1.465.287.230,- atau 96,39% dari target anggaran sebesar Rp.1.520.193.651,- kegiatan ini terdiri dari :

1.5.1 Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya, Indikator Jumlah pengadaan peralatan dan mesin kantor dengan anggaran sebesar Rp. 1.520.193.651,- terealisasi Rp.1.465.287.230,- atau 96,39% dan dan rincian pengadaan sebagai berikut :

NO	URAIAN	JUMLAH BARANG
1	Printer KIA	1 unit
2	Layar proyektor	1 unit
3	Layar proyektor	1 unit
4	Lcd Proyektor	1 unit
5	Mic wireles	2 set
6	TV	1 buah
7	Webcam	1 unit
8	AC split 2 PK	3 unit
9	AC Standing 5 PK	2 unit
10	TV 70 INCHI	1 unit
11	Alat pencetak label/porporasi	1 unit
12	Mesin Penghancur kertas	1 unit
13	Server	2 unit
14	Ipad	1 unit
15	Mini PC	3 unit
16	Notebook	2 unit
17	Printer laser	3 unit

18	Printer tinta	3 unit
19	PC komputer	10 unit
20	Scanner	2 unit
21	Printer dot matrik	3 unit
22	Baterey ups	1 unit
23	UPS	3 unit

1.6. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.

Indikator Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dilaksanakan dengan capaian kinerja 100% dari target kinerja 3 Jasa yaitu Jasa Paket Pengiriman Surat, Jasa Komunikasi/Listrik dan Jasa Pelayanan Umum Kantor dan untuk realisasi anggaran sebesar Rp.643.302.260,00 atau 93,34% dari target anggaran sebesar Rp.478.025.000, kegiatan ini terdiri dari :

1.5.1 Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat, Indikator jumlah jasa paket/pengiriman surat menyurat terealisasi 63 surat atau 157,50% dari target kinerja 40 surat dan realisasi anggaran sebesar Rp.2.998.400 atau 99,61% dari target anggaran sebesar Rp.3.000.000.

1.5.2 Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik, indikator jumlah jasa komunikasi dan listrik yang tersedia terealisasi 100% dari target kinerja 12 bulan pembayaran tagihan jasa komunikasi/listrik dan untuk realisasi anggaran sebesar Rp.179.783.040 atau 87,71% dari target anggaran sebesar Rp.194.400.000.

1.5.3 Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor, Indikator jumlah jasa pelayanan umum kantor yang terbayar terealisasi 100% dari target kinerja 12 bulan pembayaran jasa umum kantor yaitu Pegelola Keuangan, Tenaga Administrasi, Tenaga Kebersihan, Tenaga Sopir dan Tenaga Informasi dan Teknologi sedangkan untuk realisasi anggaran sebesar Rp 460.530.820 atau 95,70% dari target anggaran sebesar Rp.481.200.000.

1.6 Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.

Indikator barang milik daerah yang terpelihara terealisasi 100% dari target kinerja 60 Unit barang dan untuk realisasi anggaran sebesar Rp. 339.050.789 atau 75,87% dari target anggaran sebesar Rp.446.902.500, kegiatan ini terdiri dari :

1.6.1 Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan, Indikator jumlah kendaraan yang terpelihara terealisasi 100% dari target kinerja 19 unit kendaraan dinas dan untuk realisasi anggaran sebesar Rp.139.044.027 atau 68,02% dari target anggaran sebesar Rp.204.402.500.

1.6.2 Sub Kegiatan Pemeliharaan Mebel, indikator jumlah mebel yang dipelihara terealisasi 5 unit meja/kursi atau 29,41% dari target kinerja 17 unit meja/kursi dan untuk realisasi anggaran sebesar Rp.2.500.000 atau 97,50% dari target anggaran sebesar Rp.2.500.000.

1.6.3 Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya, Indikator jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara terealisasi 35 unit atau 116,67% dari target kinerja 30 unit peralatan komputer/printer dan jaringan dan untuk realisasi anggaran sebesar Rp.128.499.420 atau 80,31% dari target anggaran sebesar Rp.160.000.000.

1.6.4 Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya, Indikator jumlah Gedung yang terpelihara terealisasi 100% dari target kinerja 1 gedung kantor Bapenda Kabupaten Nganjuk dan untuk realisasi anggaran sebesar Rp.69.007.342 atau 86,26% dari target anggaran sebesar Rp.80.000.000.

2. Program Pengelolaan Pendapatan Daerah

Indikator capaian Program Hasil Prosentase Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) terealisasi (14,15% dari target 8,25%, Sehingga Capaian Kinerja (171,50 %) dikarenakan pelaporan untuk realisasi penerimaan belum sampai dengan akhir tahun anggaran dan penyerapan Anggaran sebesar Rp.2.399.541.7716,00 atau 79,14% dari target anggaran Rp.3.031.982.100,00 Program Pengelolaan Pendapatan Daerah terdiri dari 1 Kegiatan dan 12 Sub Kegiatan sebagai berikut :

2.1 Sub Kegiatan Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah, Indikator jumlah dokumen Rencana pengelolaan Pajak daerah terealisasi 3 dokumen atau

100% dari target kinerja 3 dokumen dan untuk realisasi anggaran sebesar Rp.172.267.030 atau 78,30 % dari target anggaran sebesar Rp.220.000.000

2.2 Sub Kegiatan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah, Indikator jumlah laporan pelaksanaan penyuluhan dan penyerbarluasan kebijakan pajak daerah terealisasi 2 laporan penyuluhan/sosialisasi atau 100,00% dari target kinerja 2 laporan dan untuk realisasi anggaran sebesar Rp. 236.050.100 atau 86,40 dari target anggaran sebesar Rp.273.215.000, hal ini dikarenakan sosialisasi sudah menggunakan media social,

2.3 Sub Kegiatan Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah, Indikator Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah terealisasi 25 jenis dari target kinerja 25 jenis sarana sehingga capaian kinerja 100 % dan prasarana pengelolaan pajak daerah dan untuk realisasi anggaran sebesar Rp. 376.049.370 atau 98,96% dari target anggaran sebesar Rp.380.000.000 merupakan sisa lelang cetak SPPT ganda, buku bantu blok, buku DPH, cetak logo DHKP di kertas continuous.

2.4 Sub Kegiatan Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Indikator Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subjek Pajak dan Wajib Pajak Daerah terealisasi 12 laporan atau 100% dari target kinerja 12 laporan dan untuk realisasi anggaran sebesar Rp. 122.230.290 atau 81,49% dari target anggaran sebesar Rp.150.000.000,

2.5 Sub Kegiatan Pengolahan, Pemeliharaan dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah, Indikator Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah terealisasi 2 laporan dari target 2 laporan sehingga caian kinerja 100 % dan untuk realisasi anggaran sebesar Rp.251.283.750 atau 93,07% dari target anggaran sebesar Rp.270.000.000.

2.6 Sub Kegiatan Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), Indikator jumlah penilaian PBB-P2 dan BPHTB terealisasi 5.599 WP atau 199,96% dari target kinerja 2800 Wajib Pajak dan untuk realisasi anggaran sebesar Rp. 44.442.400 atau 44,44% dari target anggaran sebesar Rp.100.000.000 dikarenakan dalam proses pelayanan PBB –P2 dan BHPTB sudah secara online dan sesuai dengan keadaan yang ada dilapangan sehingga dalam proses penilaian PBB-P2 dan BPHTB

dilakukan melalui Sistem yaitu E SPPT dan E BPHTB yang mengakibatkan penilaian yang ke lapangan sudah sangat berkurang.

2.7 Sub Kegiatan Penetapan Wajib Pajak Daerah, Indikator Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah terealisasi 24 dokumen atau 100 % dari target 24 dokumen dan untuk realisasi anggaran sebesar Rp 116.266.760 atau 58,13% dari target anggaran sebesar Rp.200.000.000, dikarenakan kegiatan untuk penyerahan SPPT secara simbolis tidak jadi dilaksanakan sehubungan dengan banyaknya desa yang minta segera didistribusikannya SPPT PBB-P2 ke Desa.

2.8 Sub Kegiatan Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah, Indikator Jumlah Layanan dan Konsultasi Pajak Daerah dan konsultasi terealisasi 24.284 WP atau 69,38 % dari target kinerja 35000 Wajib Pajak dan untuk realisasi anggaran sebesar Rp.81.894.075 atau 79,92% dari target anggaran sebesar Rp.102.467.000.

2.9 Sub Kegiatan Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah, Indikator jumlah Jumlah Data Pelaporan Pajak Daerah yang Telah Dilakukan Penelitian dan Verifikasi terealisasi 100% dari target kinerja 12 laporan dan untuk realisasi anggaran sebesar Rp.672.967.090 atau 81,08% dari target anggaran sebesar Rp.830.000.100.

2.10 Sub Kegiatan Penagihan Pajak Daerah, Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penagihan Pajak Daerah terealisasi 12 dokumen atau 100 % dari target 12 dokumen dan untuk realisasi anggaran sebesar Rp. 255.898.156 atau 73,11% dari target anggaran sebesar Rp.350.000.000.

2.11 Sub Kegiatan Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah, Jumlah Dokumen Hasil Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah yang selesai terealisasi 12 dokumen atau 100% dari target kinerja 12 dokumen dan untuk realisasi anggaran sebesar Rp.30.630..450 atau 61,25% dari target anggaran sebesar Rp.50.000.000, dikarenakan pengajuan pengurangan pajak daerah berkurang sehingga juga tidak melakukan pengecekan lapangan yang menyebabkan realisasi perjalanan dinas dalam kota tidak maksimal.

2.12 Sub Kegiatan Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah, Indikator Jumlah Laporan Perkembangan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah terealisasi 12 dokumen atau 100% dari target kinerja 12 dokumen dan untuk realisasi anggaran sebesar Rp.39.562.300 atau 37,22% dari target anggaran sebesar Rp.106.300.000, dikarenakan Surat Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim pengendalian dan pengawasan Pajak daerah Kabupaten Nganjuk sampai saat ini belum

ditandatangani, sehingga alokasi anggaran untuk kegiatan tersebut tidak direalisasi.

Berkenaan dengan tugas dan fungsi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Nganjuk memberikan kontribusi terhadap tujuan ke 2.1 yaitu Meningkatnya birokrasi pemerintahan daerah yang profesional dengan karakteristik berintegritas, berkinerja tinggi dan bersih dan Sasaran Meningkatnya tata kelola pemerintahan daerah yang baik dengan Indikator no 2 yaitu Rasio kemandirian keuangan daerah dengan penghitungan Realisasi PAD dibanding Realisasi Belanja dapat dilihat tabel berikut

No	Indikator	SPM / Standar Nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah (%)				Realisasi			Proyeksi	Catatan Analisis
				Tahun N-2 (2020)	Tahun N-2 (2021)	Tahun N-1 (2022)	Tahun N (2023)	Tahun N-3 (2020)	Tahun N-2 (2021)	Tahun N-2 (2022)	Tahun N - 1(2023)	
1	2	3	4		5	6	7	9	10	10	11	13
1	Prosentase PAD Terhadap Belanja			14,80	16,60	16,70	16.75	20.35	19,82	16,72	16.75	Capaian kinerja N-2 (Tahun 2022) mencapai 100,11% dengan penghitungan Realisasi PAD tahun 2022 sebesar 445.589.935.500, 99 dibanding Realisasi belanja sebesar 2.665.222.765.30 3,42 di kali 100,

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi PD (sesuai perda SOTK)

Keterkaitan Misi Bapenda Kabupaten Nganjuk dengan Bapenda Propinsi Jawa Timur `dan Kementerian Keuangan yaitu sebagaimana berikut

BAPENDA NGANJUK	BAPENDA PROVINSI	KEMENTRIAN KEUANGAN
Misi 4	Misi :	Visi :
Mewujudkan masyarakat yang demokratis, berlandaskan hukum yang didukung oleh profesionalisme aparatur	Terdepan dalam pengelolaan pendapatan daerah dan dibanggakan dalam pelayanan publik	Kami akan menjadi penggerak utama pertumbuhan ekonomi Indonesia yang inklusif di abad ke-21'
Tujuan :	Sasaran No 1 :	Misi No 2 :
Meningkatnya tata kelola pemerintahan daerah yang baik.	Mengembangkan kebijakan pendapatan daerah yang dapat diterima masyarakat, partisipatif, bertanggungjawab dan berkelanjutan	Mencapai tingkat kepatuhan pajak, bea dan cukai yang tinggi melalui pelayanan prima dan penegakan hukum yang ketat
Sasaran :		Tujuan No 1 :
Meningkatkan reformasi birokrasi yang akuntabel.		Optimalisasi penerimaan negara dan reformasi administrasi perpajakan serta reformasi kepabeanan dan cukai
		Sasaran No 2a :

		Penerimaan pajak negara yang optimal

2.3.1 Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Nganjuk tidak terlepas dari berbagai permasalahan yang dihadapi, permasalahan tersebut antara lain :

1. Terbatasnya tenaga yang berkualifikasi tertentu (Juru Sita, Penilai Pajak, dan PPNS). Tenaga Juru Sita dibutuhkan dalam rangka efektifitas pelaksanaan pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah. Petugas Penilai Asset (*appraisal*) dan pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dibutuhkan dalam rangka kecepatan pengambilan tindakan dilapangan terkait dengan pelanggaran pajak daerah dan retribusi daerah.
2. Belum adanya Tenaga IT dalam pengelolaan Pendapatan yang menggunakan Sistem Informasi
3. Belum sempurnanya *data base* pajak daerah yang dapat digunakan sebagai sumber dalam perencanaan dan peningkatan Pendapatan Asli Daerah;
4. Rendahnya kesadaran wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban membayar pajak daerah
5. Rawan terjadinya Kolusi
6. Masih rendahnya kejujuran wajib pajak dalam menyampaikan data obyek pajak
7. Masih banyaknya potensi pajak daerah yang belum terdata
8. Masih rendahnya kesadaran masyarakat/Wajib pajak dalam memanfaatkan tehnologi informasi
9. Masih adanya piutang pajak
10. Tuntutan masyarakat untuk pelayanan yang lebih cepat dan mudah

2.3.2 Dampak terhadap pencapaian visi dan misi kepala daerah apabila permasalahan dan hambatan tersebut tidak teratasi akan tidak tercapai rasio kemandiriian keuangan daerah sehingga masih tergantung dari DAU dari Pemerintah pusat.

2.3.3 Tantangan dan Peluang dalam meningkatkan pelayanan Badan Pendapatan Daerah

Tantangan :

1. Pesatnya perkembangan Sistem Informasi manajemen Pendapatan berbasis Online

2. Kesadaran masyarakat dalam memperhitungkan, membayar dan melaporkan pajak/retribusi daerah dengan benar masih rendah
3. Keterbatasan kuantitas dan kualitas SDM khususnya pemeriksa pajak dan juru sita untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak dan retribusi
4. Kurangnya kesadaran wajib pajak dan wajib retribusi serta petugas pemungut dilapangan dalam memenuhi kewajibannya
5. Masih adanya data dan peta obyek pajak dan subyek pajak dan retribusi masih belum sesuai dengan kenyataan di lapangan
6. Masih rendahnya realisasi Pendapatan Asli Daerah
7. Masih banyak obyek pajak dan retribusi daerah yang baru yang belum terdata
8. Semakin meningkatnya tuntutan masyarakat terhadap pelayanan pajak dan retribusi yang cepat dan tepat.

2. PELUANG PENGEMBANGAN PELAYANAN BADAN PENDAPATAN DAERAH

Peluang yang dihadapi dalam masa lima tahun mendatang, pengembangan untuk pelayanan adalah sebagai berikut:

1. Pembangunan dan penggunaan sistem penerimaan pajak daerah yang terintegrasi dan terpusat yang berbasis IT
2. Ketersediaan regulasi sebagai dasar pelaksanaan pemungutan Pendapatan Daerah;
3. Semakin berkembangnya perekonomian masyarakat yang berpeluang menambah obyek pajak baru

2.3.4 Formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang Strategis untuk ditindaklajuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahun yang direncanakan sebagai berikut :

ISUE STRATEGIS	TINDAK LANJUTI DALAM PROGRAM /KEGIATAN/SUBKEGIATAN
1. Pesatnya perkembangan tehnologi informasi untuk pengelolaan Pendapatan Asli Daerah	Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah
2. Adanya Elektronifikasi Transaksi Pemda	Elektronifikasi Transaksi Pemerintahan Daerah
3. Adanya Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah	Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah
4. Terbatasnya tenaga yang berkualifikasi tertentu	Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah
5. Rendahnya kesadaran wajib pajak	Pengendalian, pemeriksaan dan Pengawasan pajak Daerah

dalam melaksanakan kewajiban membayar pajak daerah	
6. Masih rendahnya kejujuran wajib pajak dalam menyampaikan data obyek pajak	Pengendalian, pemeriksaan dan Pengawasan pajak Daerah
7. Masih banyaknya potensi pajak daerah yang belum terdata	- Perencanaan pengelolaan pajak daerah - Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah
8. Masih rendahnya kesadaran masyarakat/Wajib pajak dalam memanfaatkan tehnologi informasi	- Elektronifikasi Transaksi Pemerintahan Daerah - Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah
9. Masih adanya piutang pajak	Penagihan Pajak Daerah
10. Tuntutan masyarakat untuk pelayanan yang lebih cepat dan mudah	- Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah
11. Masih rawannya terjadi korupsi, pungli	- Elektronifikasi Transaksi Pemerintahan Daerah
12. Jangkauan pelayanan kurang optimal dibandingkan dengan luas Wilayah operasional	
13. Adanya kebutuhan sarana prasarana dalam proses pengelolaan Pajak	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah
14. Data Wajib Pajak/Obyek Pajak perlu diupdate	Penetapan Wajib Pajak Daerah
15. Masih ada data Wajib Pajak/Obyek Pajak yang tidak sesuai dengan lapangan	- Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) - Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah

Dari Indentifikasi Isue Strategis tersebut dirumuskan Program dan kegiatan Prioritas Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Nganjuk yaitu Program/Kegiatan Pengelolaan Pendapatan yang digunakan untuk :

1. Penyuluhan dan penyerbarluasan kebijakan Pajak untuk memberikan penyuluhan kepada Wajib Pajak/Wajib Retribusi /Wajib Pungut
2. Kegiatan Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan terhadap Wajib Pajak/Wajib Retribusi /Wajib Pungut dalam kepatuhan pembayaran pajak.
3. Pengembangan Sim Pengelolaan Pajak untuk lebih mengoptimalkan data base pajak, pelayanan Online , pelaporan pajak

4. Validasi piutang , penagihan piutang pajak
5. Pendaftaran maupun pendataan pajak baik yang baru maupun yang sudah ada tetapi berubah bentuk, fungsinya sehingga dapat ditetapkan sesuai dengan yang ada di lapangan.
6. Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah diantaranya Perubahan Perda.
7. Tersedianya SDM berkualitas yang mendukung peningkatan pendapatan daerah.
8. Meningkatkan kejujuran dan kesadaran wajib pajak & retribusi dalam memenuhi kewajibannya.
9. Meningkatkan mutu pelayanan dan sistem pengelolaan pajak secara transparan dan akuntabel yang berbasis teknologi informasi.
10. Meningkatkan potensi penerimaan pajak daerah.
11. Meningkatkan jumlah investor yang masuk untuk pendirian pabrik, Perumahan.
12. Meningkatnya perkembangan obyek wisata.
13 pelaksanaan sosialisasi pembayaran Pajak dengan Non Tunai

2.4 Review Terhadap Rencana Awal RKPD

Proses reviu rancangan awal RKPD Tahun 2024 adalah membandingkan antara rancangan awal RKPD Tahun 2024 dengan analisis kebutuhan. Temuan proses reviu tersebut berupa identifikasi rumusan program dan kegiatan baru yang tidak terdapat di rancangan awal RKPD, atau program dan kegiatan yang sesuai namun besarannya berbeda, sebagaimana disajikan tabel berikut :

Tabel 2.8
Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Kabupaten Nganjuk Tahun 2024

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisi Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	NIHIL										

Sumber: Hasil Analisis Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2023

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Hasil kajian terhadap program/kegiatan yang diusulkan para pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat, organisasi kemasyarakatan, asosiasi dan/atau organisasi profesi yang terkait langsung

dengan pelayanan Perangkat Daerah, penelaahan pokok-pokok pikiran DPRD, serta hasil pengumpulan, penelitian dan pengamatan pelaksanaan Musrenbang Kecamatan kesesuaiannya dengan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah untuk Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Nganjuk tidak ada usulan sehingga tabel TC. 32 berikut:

Tabel TC 32
Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2020
Kabupaten Nganjuk
Badan Pendapatan Daerah

No	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/Volume	Catatan
	NIHIL	-	-	-	-

`BAB III
TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Pembangunan nasional dalam RPDTahun 2024 mengangkat tema **"Peningkatan Produktivitas untuk Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan"** dengan 7 (tujuh) prioritas pembangunan nasional tahun 2024 sebagai berikut :

1. Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan;
2. Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan;
3. Meningkatkan sumber daya manusia berkualitas dan berdaya saing;
4. Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan;
5. Memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar;
6. Membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana dan perubahan iklim; dan
7. Memperkuat stabilitas politik, hukum, pertahanan, dan keamanan (Polhukhankam) dan transformasi pelayanan publik.

Dalam pencapaian prioritas pembangunan nasional tahun 2024 menuntut upaya konkrit, dengan menyelaraskan program dan kegiatan pembangunan daerah yang secara langsung memiliki relevansi terhadap tema pembangunan nasional dan mendukung pencapaian sasaran, arah kebijakan dan strategi pembangunan nasional.

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Tujuan Badan Pendapatan Daerah yang telah ditetapkan dalam Rentra Bapenda kabupaten Nganjuk Tahun 2024-2026 "*Meningkatnya Pengelolaan Pendapatan*", indicator Prosentase Realisasi PAD terhadap Pendapatan dan sasaran yang akan dicapai "*Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah*" *Indikator Prosentase Kenaikan PAD* dengan target kinerja sebagaimana tabel berikut:

Tabel 3.1
Tujuan dan sasaran Bapenda Kabupaten Nganjuk

Tujuan Perangkat Daerah	Indikator Kinerja	Target Tahun 2024
Meningkatnya Pengelolaan Pendapatan	*Prosentase Realisasi PAD terhadap Pendapatan*	20%
Sasaran Perangkat Daerah	Indikator Kinerja	Target Tahun 2024
Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah	*Prosentase Kenaikan PAD*	18%

3.3 Program dan Kegiatan

Dalam perumusan program dan kegiatan Perangkat Daerah tahun 2024 mempedomani agenda pembangunan nasional dan daerah serta mempertimbangkan kondisi global saat ini.

Faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan yaitu :

3.3.1. Pencapaian Visi dan Misi Kabupaten Nganjuk

Untuk pencapaian visi pembangunan jangka panjang Kabupaten Nganjuk Tahun 2005-2025

3.3.2 Pencapaian Target Pelayanan Dasar

Sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Minimal, Pemerintah Daerah diwajibkan untuk memberikan jenis pelayanan dasar dan mutu pelayanan dasar yang berhak diperoleh setiap warga negara secara minimal, dengan target 100% (seratus persen) untuk semua jenis penerima layanan setiap tahun, sebagaimana tabel berikut:

Tabel 3.2
Jenis dan Mutu Pelayanan Dasar

No.	Jenis Pelayanan Dasar	Target
1.	Pendidikan anak usia dini	100%
2.	Pendidikan dasar	100%
3.	Pendidikan kesetaraan	100%
4.	Pelayanan kesehatan ibu hamil	100%
5.	Pelayanan kesehatan ibu bersalin	100%
6.	Pelayanan kesehatan bayi baru lahir	100%
7.	Pelayanan kesehatan balita	100%
8.	Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar	100%
9.	Pelayanan kesehatan pada usia produktif	100%
10.	Pelayanan kesehatan pada usia lanjut	100%
11.	Pelayanan kesehatan penderita hipertensi	100%

No.	Jenis Pelayanan Dasar	Target
12.	Pelayanan kesehatan penderita diabetes melitus	100%
13.	Pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat	100%
14.	Pelayanan kesehatan orang terduga tuberkulosis	100%
15.	Pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (human immunodeficiency virus)	100%
16.	Pemenuhan kebutuhan pokok air minum sehari-hari	100%
17.	Penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik	100%
18.	Penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana daerah kabupaten/kota	100%
19.	Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program pemerintah daerah kabupaten/kota	100%
20.	Pelayanan ketenteraman dan ketertiban umum	100%
21.	Pelayanan informasi rawan bencana	100%
22.	Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	100%
23.	Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	100%
24.	Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	100%
25.	Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar di luar panti	100%
26.	Rehabilitasi sosial dasar anak terlantar di luar panti	100%
27.	Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar di luar panti	100%
28.	Rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di luar panti	100%
29.	Perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana daerah kabupaten/kota	100%

Sumber: Permendagri Nomor 59 Tahun 2021

3.3.2. Pencapaian Target Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDG's)

Upaya pencapaian target TPB/*SDG's* menjadi prioritas pembangunan nasional, yang memerlukan sinergi kebijakan perencanaan di tingkat nasional dan di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota. Target-target TPB/*SDG's* di tingkat nasional telah sejalan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 dalam bentuk program, kegiatan dan indikator yang terukur serta indikasi dukungan pembiayaannya.

Tabel 2.6
Target Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDG's)
Kabupaten Nganjuk

No.	Tujuan/Target/Indikator	Satuan	Target 2023	Pelaksana
1.	Total pendapatan pemerintah sebagai proporsi terhadap PDB menurut sumbernya	%	14,85	BAPENDA

No.	Tujuan/Target/Indikator	Satuan	Target 2023	Pelaksana
2.	Rasio penerimaan pajak terhadap PDB	%	5,90	BAPENDA

Sumber: RAD TPB Kabupaten Nganjuk Tahun 2019-2023

3.3.3. Penanganan Pandemi COVID-19

Krisis kesehatan akibat pandemi Covid-19 telah berdampak sistemik terhadap pembangunan nasional, terutama pada aspek sosial dan ekonomi. Kontraksi ekonomi yang terjadi di Indonesia pada tahun 2020 mengakibatkan meningkatnya angka pengangguran, melemahnya daya beli masyarakat dan menurunnya produktivitas di sektor-sektor strategis. Kebijakan pemulihan ekonomi nasional masih perlu dilakukan pada tahun 2022.

Pandemi Covid-19 mengubah secara signifikan pola interaksi antarmanusia, sehingga berimplikasi terhadap perubahan pola aktivitas ekonomi, sosial, serta pelayanan publik. Penerapan *social distancing* dan protokol kesehatan menuntut penggunaan teknologi digital secara intensif dalam mendukung aktivitas manusia. Kondisi demikian tetap akan berlangsung dalam kehidupan era *new normal*, meskipun *herd immunity* diharapkan telah tercapai di tahun 2022. Penanganan dampak pandemi COVID-19 di Kabupaten Nganjuk diprioritaskan pada:

1. Penanganan kesehatan;
2. Penanganan dampak ekonom; dan
3. Penyediaan jaring pengaman sosial.
4. Penanganan dampak inflasi

Dari berbagai faktor pertimbangan yang telah diuraikan sebelumnya dapat dirumuskan rekapitulasi program dan kegiatan Badan Pendapatan Daerah sebagaimana berikut :

1. **Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten**/Kota

   Program ini bertujuan untuk memperlancar pelaksanaan tugas diantaranya digunakan untuk

   - menyusun perencanaan, penganggaran dan Evaluasi

Kinerja;

- Menyusun administrasi Keuangan daerah
- Menyusun Administrasi Barang Milik Daerah
- Menyusun Administrasi Kepegawaian
- Menyusun Administrasi Umum
- Pengadaan Barang Milik Daerah
- Penyediaan Jasa Penunjang
- Pemeliharaan Barang Milik daerah

Dengan sasaran Program :

1. Pelaksanaan Survey Kepuasan Masyarakat (IKM) dalam pelayanan Pajak
2. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Bapenda

Indikator Program :

1. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dalam pelayanan pajak,
2 Nilai Sakip Bapenda

Program ini terdiri dari Kegiatan sebagai berikut

1. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat daerah;

Kegitan ini bertujuan untuk Menyusun perencanaan penganggaran dan Evaluasi Kinerja. Sasaran Kegiatan ini Meningkatnya pengelolaan perencanaan penganggaran dan evaluasi Kinerja dengan Indikator output Jumlah dokumen Perencanaan dan Dokumen laporan Evaluasi Kinerja dengan hasil adalah Prosentase dokumen Perencanaan, Pengganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun. Kegiatan ini terdiri dari Subkegiatan sebagai berikut :

1.1. Sub kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah:

Sub kegiatan ini digunakan untuk penyusunan Renja, Perubahan Renja, RKA, DPA, RKAP, RTP, dan penyusunan perencanaan lainnya. Sasaran Sub kegiatan ini yaitu Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah dengan Indikator Output Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah, dan hasil Persentase dokumen perencanaan yang disusun , sehingga dengan adanya subkegiatan ini setiap program terencana dan tersusun dengan baik

1.2. Sub kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Sub kegiatan ini digunakan untuk melaksanakan laporan monitoring dan evaluasi dan kinerja perangkat Sasaran Subkegiatan ini Terlaksananya Evalual Kinerja Perangkat Daerah dengan Indikator Output adalah Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat dan hasil Prosentase Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang tersusun sehingga tercipta pola kerja yang lebih baik dan menunjang kinerja perangkat daerah yang lebih maju.

2. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah;

Kegiatan ini digunakan untuk menyusun pembayaran gaji dan tunjangan gaji dan pelaporan keuangan baik tahunan maupun bulanan, tribulan serta semester dengan Indikator Output Jumlah dokumen administrasi keuangan Perangkat daerah yang disusun dan hasil Persentase administrasi keuangan Perangkat daerah yang tersusun. Kegiatan ini terdiri dari sub kegiatan sebagai berikut :

2.1 Sub kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN

Subkegiatan : kegiatan diperuntukan pembayaran gaji dan tunjangan, Tambahan Penghasilan ASN, Tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan obyektif lainnya ASN, Belanja Insentif dibagi KDH/WKDH atas pemungutan pajak dan Retribusi daerah.

Sasaran Sub kegiatan : ini terbayarnya Gaji dan Tunjangan ASN Indikator keluaran : Jumlah dokumen Gaji dan Tunjangan ASN dan hasil persentase dokumen gaji dan tunjangan ASN, sehingga terbayarkan gaji dan tujangan ASN tepat waktu.

2.2 Sub Kegiatan Koordinasi dan PenyusunanLaporan Keuangan Akhir Tahun SKPD

Sub kegiatan ini digunakan untuk mendukung penyusunan laporan akhir tahun.

Sasaran Sub kegiatan ini Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD, dengan Indikator keluaran Jumlah Laporan

Keuangan Akhir Tahun SKPD dan hasil persentase Jumlah Laporan Keuangan Akhir tahun, sehingga laporan akhir tahun tepat waktu.

2.3 Subkegiatan koordinasi dan penyusunan laporan keuangan bulanan/triwulanan/semesteran SKPD

Subkegiatan ini digunakan penyusunan laporan bulanan untuk pelaporan bendahara penerimaan dan Bendahara Pengeluaran/trwulan/ dan semesteran

Sasaran Subkegiatan ini Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dengan Indikator keluaran Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan hasil persentase Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD, sehingga penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD tepat waktu

3. Kegiatan Adminstrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah

Kegiatan ini bertujuan untuk pengadministrasian Barang Milik daerah dengan Sasaran Administrasi Barang Milik daerah yang dilaksanakan dengan indicator Jumlah Administrasi Barang Milik Daerah. Kegiatan ini terdiri dari Subkegiatan sebagai berikut :

3.1 Sub kegiatan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD

Subkegiatan ini laksanakan untuk penatausahaan barang milik daerah pada SKPD dengan Sasaran Meningkatnya pengelolaan Penatausahaan BMD SKPD indicator hasil adalah Jumlah Dokumen penatausahaan barang milik daerah sehingga Barang milik Daerah dapat terinventarisasi dengan baik.

4. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan disiplin ASN, meningkatkan Indeks Profesionalisme ASN, dan pengadministrasian Kepegawaian dengan Sasaran Tingkat disiplin ASN indicator Jumlah ASN yang hadir dan pulang tepat waktu. Kegiatan ini terdiri dari Subkegiatan sebagai berikut :

4.1 Sub kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya

Sasarannya adalah Meningkatnya disiplin ASN Bapenda
Indikator keluaran adalah Jumlah paket Pakaian Dinas beserta Atribut kelengkapannya
Hasilnya adalah pakaian Dinas beserta Atribut kelengkapan yang tersedia.

Dengan adanya subkegiatan ini akan meningkatkan kedisiplinan ASN dalam memakai Pakaian dinas beserta atributnya.

4.2 Subkegiatan Pendataan dan pengolahan Administrasi Kepegawaian

Sasaran Meningkatnya pengolahan administrasi kepegawaian Bapenda dengan indicator Jumlah dokumen pendataan dan pengolahan administrasi kepegawaian. Dengan adanya subkegiatan ini administrasi kepegawaian tertib

4.3. Subkegiatan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang - Undangan

SasarannyaTerlaksananya Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan;
Indikator keluarannya jumlah orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang – Undangan

Dengan adanya subkegiatan ini diharapkan dapat meningkatkan indeks Penilaian ASN Bapenda dan juga tercipta pemahaman yang matang bagi para pegawai akan peraturan perundang-undangan

5. Kegiatan Administrasi Umum PerangkatDaerah;

Kegiatan ini bertujuan untuk menunjang urusan pemerintahan Daerah dengan Optimal dalam hal urusan administrasi umum Perangkat Daerah.
Sasaranya adalah Meningkatnya pengelolaan pengadministrasian umum perangkat daerah.
Indikator Keluaran Kegiatan ini adalah Jumlah Laporan administrasi umum.
Hasilnya Persentase Pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah.

Kegiatan ini terdiri dari subkegiatan sebagai berikut :

5.1 Sub kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

Digunakan untuk menyediakan alat tulis kantor, peralatan listrik peralatan kebersihan, peralatan kantor dan perlengkapan kantor

Sasarannya adalah Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor

Indikatornya Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor sehingga memudahkan kelancaran pelayanan administrasi kantor.

5.2 Sub kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor

Digunakan untuk menyediakan makan minum harian ASN bahan kebersihan kantor, bahan kesehatan ASN
Sasarannya adalah Tersedianya Bahan Logistik Kantor
Indikator keluaran adalah Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor
Dengan tersedianya bahan Logistik kantor diharapkan memperlancar pelaksanaan tugas

5.3 Sub kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

Digunakan untuk cetak kebutuhan adminstrasi kantor, cetak banner dan penggandaan berkas –berkas surat .

Sasarannya adalah Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan

Indikator keluarnya adalah Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang disediakan.
Dengan adanya Subkegiatan ini diharapkan dpat meningkatkan kelancaran pelaksanaan administrasi dan pelayanan masyarakat.

5.4 Sub kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan

Digunakan untuk berlangganan surat kabar/Koran dan menyediakan buku buku peraturan dengan sasarannya adalah Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan, dengan indikator Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang disediakan, sehingga terpenuhinya bahan bacaan bagi pegawai dalam meningkatkan pengetahuan umum pegawai.

5.5 Sub kegiatan Fasilitasi Kunjungan Tamu

Digunakan untuk menyediakan makan minum tamu dinas, dengan sasarannya adalah Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu dan indikatornya Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu, sehingga dengan tersedianya kepeluan tamu dinas tercipta hubungan yang harmonis antara banyak pihak.

5.6 Sub kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

Digunakan untuk kebutuhan rapat, koordinasi dan konsultasi baik dalam kota maupun luar kota dan juga untuk menyediakan makan minum rapat dinas.

Sasarannya adalah Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD, dengan Indikator keluarannya adalah Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD, sehingga mampu terselenggaranya rapat koordinasi dan konsultasi keluar dan dalam daerah dalam menunjang tercapainya PAD.

5.7 Subkegiatan Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD

Digunakan untuk melaksanakan penataan arsip dinamis.

Sasarannya adalah Terlaksananya Penatausahaan Arsip Dinamis pada Bapenda, dengan Indikator keluarannya Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada Bapenda.

5.8 Subkegiatan Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan berbasis Elektronik pada SKPD

Sasarannya adalah Terlaksananya Sistem Pemerintahan berbasis Elektronik pada Bapenda dengan Indikator keluarannya Jumlah Laporan Pelaksanaan ETPD

6 Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

Kegiatan ini bertujuan untuk menunjang urusan pemerintahan Daerah dengan Optimal dalam hal Pengadaan Barang Milik Daerah, dengan sasarannya Pemenuhan Pengadaan Barang Milik Daerah dan Indikator Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah, sehingga dengan tercukupinya barang akan memperlancar pelaksanaan tugas.

Kegiatan ini terdiri dari subkegiatan sebagai berikut :

6.1 Sub kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan

Sasaran adalah Tersedianya Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan dengan indikator keluaran adalah Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau lapangan yang diadakan sehingga menunjang kelancaran operasional kantor.

6.2 **Subkegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan**

Sasarannya adalah tersedianya kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan dengan indikator Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang disediakan, sehingga dapat memperlancar pelaksanaan tugas dalam rangka pendataan, penagihan, pencarian potensi, dan pengawasan pajak.

6.3 Subkegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya

Sasarannya adalah Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya, dengan indicator Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang disediakan, sehingga dapat memperlancar pelaksanaan tugas dan mengomptimalkan pelayan prima.

6.4 Sub kegiatan Pengadaan Mebel

Sasarannya adalah tersedianya mebel, dengan indikator Jumlah Paket Mebel yang disediakan sehingga tersedianya dapat tercipta kenyamanan karyawan dalam bertugas

7. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Kegiatan ini bertujuan untuk menunjang urusan pemerintahan Daerah dengan Optimal di bidang pengadaaan jasa . Sasarannya adalah penyediaan jasa yang dilaksanakan, dengan Indikator hasil adalah Persentase Pemenuhan Penyediaan jasa penunjang Urusan Pemerintah Daerah.

Kegiatan ini terdiri dari subkegiatan sebagai berikut :

7.1 Sub kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat

Sasarannya adalah Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat, dengan Indikator Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat, sehingga tercipta kelancaran dan kecepatan dalam kegiatan surat menyurat.

3.3 Sub kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

Sasarannya adalah Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik, dengan Indikator Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan, sehingga memudahkan koordinasi dan komunikasi dalam menunjang kegiatan kedinasan

7.3 Sub kegiatan Penyediaan jasa pelayanan umum kantor

Sasarannya adalah Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor, dengan Indikator Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan untuk menunjang

kelancaran kegiatan pelayanan kantor.

8. **Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah;**

Kegiatan ini bertujuan untuk memelihara Barang Milik Daerah agar dapat menunjang urusan pemerintahan Daerah dengan Optimal. Sasaranya adalah Terlaksananya pemeliharaan barang milik daerah, dengan Indikator adalah Jumlah barang milik daerah yang dipelihara, sehingga dapat menambah umur barang.

Kegiatan ini terdiri dari Subkegiatan sebagai berikut :

8.1 Sub kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas operasional atau lapangan
Sasarannya adalah Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan, dengan Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang dipelihara sehingga terpenuhinya pemeliharaan,perawatan dan perbaikan kendaraan dinas operasional sebagai penunjang kelancaran pelaksanaan tugas karyawan / karyawati.

8.2 Sub kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan lainnya
Sasaran Subkegiatan ini adalah Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya, dengan Indikator Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi yang dipelihara sehingga terciptanya kenyamanan gedung tempat bertugas.

8.3 Sub kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan mesin lainnya
Sasarannya adalah Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya, dengan Indikator Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara

8.4 SubKegiatan Pemeliharaan Mebel

Sasarannya adalah Terlaksananya Pemeliharaan Mebel, dengan

indicator Jumlah Mebel yang Dipelihara

2. Program Pengelolaan Pendapatan Daerah

Program ini bertujuan sebagai media pendukung pelaksanaan seluruh Kegiatan dan sub kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah.

Sasarannya Program sebagai berikut :

1. Meningkatnya Pengelolaan Pendapatan dengan indicator :
   1. Prosentase Realisasi Pajak Daerah dan
   2. Prosentase Realisasi Retribusi Daerah yang dikelola,
2. Meningkatnya Pengelolaan Pelayanan dan Pengembangan Pendapatan daerah dengan indikator Jumlah Wajib pajak baru

3. Meningkatnya Pengendalian dan Evaluasi dengan Indikator Jumlah wajib Pajak yang membayar tepat waktu

Program ini terdiri dari kegiatan sebagai berikut :

2.1. Pengelolaan Pendapatan Daerah ;

Kegiatan ini bertujuan untuk mengoptimalkan capaian Pendapatan Daerah.

1. Meningkatnya Pengelolaan Pendapatan dengan indicator :
    1. Prosentase Realisasi Pajak Daerah dan
    2. Prosentase Realisasi Retribusi Daerah yang dikelola,
2. Meningkatnya Pengelolaan Pelayanan dan Pengembangan Pendapatan daerah dengan indikator Jumlah Wajib pajak baru
3. Meningkatnya Pengendalian dan Evaluasi dengan Indikator Jumlah wajib Pajak yang membayar tepat waktu

Kegiatan ini terdiri dari subkegiatan sebagai berikut :

2.1.1 Subkegiatan Perencanaan pengelolaan pajak daerah

Sasarannya adalah Tersedianya Rencana Pengelolaan Pajak Daerah, dengan Indikator Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Pajak Daerah

2.1.2 Subkegiatan Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah,

Sasarannya Tersedianya Hasil Analis Pajak Daerah serta Terlaksananya Pengembangan Pajak Daerah dan Kebijakan Pajak Daerah, dengan Indikator Jumlah Dokumen Hasil Analis Pajak Daerah serta Pengembangan Pajak Daerah dan Kebijakan Pajak Daerah

2.1.3 SubKegiatan Penyuluhan dan penyebarluasan kebijakan pajak daerah

Sasarannya Terlaksananya Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah, dengan indicator Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah

2.1.4 Subkegiatan Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah

Sasarannya Tersedianya Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah, dengan Indikator Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah, sehingga mempermudah wajib pajak dalam memenuhikewajibannya.

2.1.5 Sukegiatan Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah

Sasarannya adalah Tersedianya Data Objek Pajak, Subjek Pajak dan Wajib Pajak Daerah, dengan Indikator Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subjek Pajak dan Wajib Pajak Daerah sehingga mampu tercapainya potensi dan data pajak daerah.

2.1.6 Subkegiatan Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah

Sasarannya adalah Terlaksananya Pengolahan Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah,

Dengan indikator Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan , dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah

2.1.7 Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)

Sasarannya adalah Terpenuhinya Jumlah Objek Pajak yang Disesuaikan NJOP nya, dengan Indikator Jumlah Objek Pajak yang Disesuaikan NJOP nya sehingga dapat mengoptimalkan pendapatan daerah.

2.1.8 Subkegiatan Penetapan Wajib Pajak Daerah

Sasarannya Tersedianya data Ketetapan Pajak Daerah, dengan Indikator Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah

2.1.9 Subkegiatan Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah

Sasarannya adalah Tersedianya Layanan dan Konsultasi Pajak Daerah, dengan Indikator Jumlah Layanan dan Konsultasi Pajak Daerah sehingga dapat di ukur optimalnya pelayanan pada Badan Pendapatan Daerah

2.1.10 Subkegiatan Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak

Sasarannya adalah Terlaksananya Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah, dengan Indikator Jumlah Data Pelaporan Pajak Daerah yang Telah dilakukan Penelitian dan Verifikasi sehingga

terdapat ketepatan data pelaporan Pajak

2.1.11 Subkegiatan Penagihan Pajak Daerah

Sasarannya adalah Terlaksananya Penagihan Pajak Daerah, dengan Indikator Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penagihan Pajak Daerah sehingga dapat mengoptimalkan Pendapatan Daerah

2.1.12 Subkegiatan Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah

Sasarannya adalah Terlaksananya Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah, dengan Indikator Jumlah Dokumen Hasil Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah

2.1.13 Subkegiatan Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah

Sasarannya adalah Terlaksanannya Pemeriksaan serta Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah, dengan Indikator Jumlah Dokumen Hasil Pemeriksaan serta Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah sehingga dapat mengoptimalkan Pendapatan Daerah

2.1.14 Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi

Sasarannya adalah terlaksanaya pembinaan dan pengawasan pengelolaan Retribusi Daerah, dengan indikator Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah sehingga Pengelolaan Retribusi daerah bisa terkendali dengan baik.

2.1.15 Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah

Sasarannya adalah Terlaksananya Upaya Mengubah Transasksi Tunai menjadi Non Tunai, dengan Indikator Jumlah Laporan Perkembangan Elektronifikasi Transasksi Pemerintah Daerah, sehingga transasksi pembayaran non tunai dapat di implementasikan

Dari uraian tersebut dapat dirumuskan rekapitulasi program dan kegiatan Badan Pendapatan daerah Sebagaimana table berikut :

''TABEL PRINT OUT SIPD : MENU RENJA PD TAHUN 2024:

RENCANA KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (RENJA OPD)
BADAN PENDAPATAN DAERAH KAB. NGANJUK
TAHUN 2024

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		BADAN PENDAPATAN DAERAH						**16.044.177.305,00**							**23.134.216.938,00**	
	5	**UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN**						**16.044.177.305,00**							**23.134.216.938,00**	
	5.02	**KEUANGAN**						**16.044.177.305,00**							**23.134.216.938,00**	
1.	**5.02.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	***Nilai Sakip SKPD***	**85,5 % A Nilai**			**80 Nilai**	**12.219.980.505,00**						**85,25 % A Nilai**	**17.939.216.938,00**	
	5.02.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi yang selesai*	-			13 Dokumen	35.365.100,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	PP7 - Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi Masyarakat di Jawa Timur Meningkatkan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik dengan pemanfaatan teknologi informasi (e-gov)	Kabupaten Nganjuk	-	40.000.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				6 Dokumen	15.381.300,00	Kab. Nganjuk, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	PP7 - Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi Masyarakat di Jawa Timur Meningkatkan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik dengan pemanfaatan teknologi informasi (e-gov)	Kabupaten Nganjuk		20.000.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH

PARAF KOORDINASI

No.	Pejabat	Paraf	Tgl.
1.	Sekret-		31/7 2023
2.	Kabid Rendatu		31/7 23
3	Kabid PPM		31/7 23
4.			
5.			

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	5.02.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah														
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				7 Laporan	19.983.800,00	Kab. Nganjuk, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	PP7 - Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi Masyarakat di Jawa Timur Meningkatkan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik dengan pemanfaatan teknologi informasi (e-gov)	Kabupaten Nganjuk		20.000.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Laporan Keuangan yang selesai*	-			71 Dokumen	9.883.773.255,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	PP7 - Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi Masyarakat di Jawa Timur Meningkatkan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik dengan pemfeatan teknologi informasi (e-gov)	Kabupaten Nganjuk	-	15.147.184.688,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				45 Orang/bulan	9.828.341.255,00	Kab. Nganjuk, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	PP7 - Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi Masyarakat di Jawa Timur Meningkatkan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik dengan pemanfaatan teknologi informasi (e-gov)	Kabupaten Nganjuk		15.068.684.688,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD														
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	5.480.000,00	Kab. Nganjuk, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	PP7 - Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi Masyarakat di Jawa Timur Meningkatkan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik dengan pemanfaatan teknologi informasi (e-gov)	Kabupaten Nganjuk		8.500.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				25 Laporan	49.952.000,00	Kab. Nganjuk, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	PP7 - Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi Masyarakat di Jawa Timur Meningkatkan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik dengan pemanfaatan teknologi informasi (e-gov)	Kabupaten Nganjuk		70.000.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	*Dokumen Administrasi Barang Milik Daerah Yang Dilaksanakan*	-			1 Dokumen	19.338.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	PP7 - Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi Masyarakat di Jawa Timur Meningkatkan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik dengan pemanfaatan teknologi informasi (e-gov)	Kabupaten Nganjuk	-	20.000.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				15 Laporan	19.338.000,00	Kab. Nganjuk, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	PP7 - Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi Masyarakat di Jawa Timur Meningkatkan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik dengan pemanfaatan teknologi informasi (e-gov)	Kabupaten Nganjuk		20.000.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	*Laporan Tingkat Kehadiran ASN*	-			12 Laporan	199.685.500,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	PP7 - Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi Masyarakat di Jawa Timur Meningkatkan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik dengan pemanfaatan teknologi informasi (e-gov)	Kabupaten Nganjuk	-	278.000.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelangkapan				44 Paket	35.200.000,00	Kab. Nganjuk, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	PP7 - Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi Masyarakat di Jawa Timur Meningkatkan tata keloia pemerintahan dan pelayanan publik dengan pemanfaatan teknologi informasi (e-gov)	Kabupaten Nganjuk		100.000.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian														
			Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian				12 Dokumen	4.961.500,00	Kab. Nganjuk, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	PP7 - Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi Masyarakat di Jawa Timur Meningkatkan tata keloia pemerintahan dan pelayanan publik dengan pemanfaatan teknologi informasi (e-gov)	Kabupaten Nganjuk		8.000.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				63 Orang	159.524.000,00	Kab. Nganjuk, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	PP7 - Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi Masyarakat di Jawa Timur Meningkatkan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik dengan pemanfaatan teknologi informasi (e-gov)	Kabupaten Nganjuk		170.000.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Jumlah Laporan Administrasi Umum yang dilaksanakan*	-			12 Laporan	566.665.500,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	PP7 - Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi Masyarakat di Jawa Timur Meningkatkan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik dengan pemanfaatan teknologi informasi (e-gov)	Kabupaten Nganjuk	-	585.000.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				90 Paket	150.000.000,00	Kab. Nganjuk, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	PP7 - Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi Masyarakat di Jawa Timur Meningkatkan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik dengan pemanfaatan teknologi informasi (e-gov)	Kabupaten Nganjuk		150.000.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				60 Paket	74.999.500,00	Kab. Nganjuk, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	PP7 - Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi Masyarakat di Jawa Timur Meningkatkan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik dengan pemanfaatan teknologi informasi (e-gov)	Kabupaten Nganjuk		80.000.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				118096 Paket	46.998.900,00	Kab. Nganjuk, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	PP7 - Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi Masyarakat di Jawa Timur Meningkatkan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik dengan pemanfaatan teknologi informasi (e-gov)	Kabupaten Nganjuk		60.000.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan														
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				1120 Dokumen	4.200.000,00	Kab. Nganjuk, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	PP7 - Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi Masyarakat di Jawa Timur Meningkatkan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik dengan pemanfaatan teknologi informasi (e-gov)	Kabupaten Nganjuk		5.000.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				12 Laporan	9.970.000,00	Kab. Nganjuk, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	PP7 - Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi Masyarakat di Jawa Timur Meningkatkan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik dengan pemanfaatan teknologi informasi (e-gov)	Kabupaten Nganjuk		10.000.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	205.519.000,00	Kab. Nganjuk, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	PP7 - Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi Masyarakat di Jawa Timur Meningkatkan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik dengan pemanfaatan teknologi informasi (e-gov)	Kabupaten Nganjuk		200.000.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD				12 Dokumen	74.978.100,00	Kab. Nganjuk, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	PP7 - Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi Masyarakat di Jawa Timur Meningkatkan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik dengan pemanfaatan teknologi informasi (e-gov)	Kabupaten Nganjuk		80.000.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*Jumlah Laporan Pengadaan Barang Milik Daerah Yang Diadakan*	-			2 Laporan	381.534.650,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	PP7 - Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi Masyarakat di Jawa Timur Meningkatkan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik dengan pemanfaatan teknologi informasi (e-gov)	Kabupaten Nganjuk	-	500.000.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				50 Unit	109.187.250,00	Kab. Nganjuk, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	PP7 - Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi Masyarakat di Jawa Timur Meningkatkan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik dengan pemanfaatan teknologi informasi (e-gov)	Kabupaten Nganjuk		0,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				10 Unit	272.347.400,00	Kab. Nganjuk, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	PP7 - Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi Masyarakat di Jawa Timur Meningkatkan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik dengan pemanfaatan teknologi informasi (e-gov)	Kabupaten Nganjuk		500.000.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	5.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Jumlah Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Yang Dilaksanakan*	-			3 Jasa	715.179.600,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	PP7 - Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi Masyarakat di Jawa Timur Meningkatkan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik dengan pemanfaatan teknologi informasi (e-gov)	Kabupaten Nganjuk	-	891.532.250,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				12 Laporan	5.000.000,00	Kab. Nganjuk, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	PP7 - Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi Masyarakat di Jawa Timur Meningkatkan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik dengan pemanfaatan teknologi informasi (e-gov)	Kabupaten Nganjuk		5.000.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	189.000.000,00	Kab. Nganjuk, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	PP7 - Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi Masyarakat di Jawa Timur Meningkatkan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik dengan pemanfaatan teknologi informasi (e-gov)	Kabupaten Nganjuk		194.000.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	521.179.600,00	Kab. Nganjuk, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	PP7 - Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi Masyarakat di Jawa Timur Meningkatkan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik dengan pemanfaatan teknologi informasi (e-gov)	Kabupaten Nganjuk		892.532.250,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	5.02.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Barang Milik Daerah Yang dipelihara*	-			52 Unit	418.438.900,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	PP7 - Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi Masyarakat di Jawa Timur Meningkatkan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik dengan pemanfaatan teknologi informasi (e-gov)	Kabupaten Nganjuk	-	477.500.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				19 Unit	235.978.900,00	Kab. Nganjuk, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	PP7 - Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi Masyarakat di Jawa Timur Meningkatkan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik dengan pemanfaatan teknologi informasi (e-gov)	Kabupaten Nganjuk		250.000.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.09.0005	Pemeliharaan Mebel														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Mebel yang Dipelihara				10 Unit	3.500.000,00	Kab. Nganjuk, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	PP7 - Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi Masyarakat di Jawa Timur Meningkatkan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik dengan pemanfaatan teknologi informasi (e-gov)	Kabupaten Nganjuk		2.500.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				22 Unit	125.000.000,00	Kab. Nganjuk, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	PP7 - Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi Masyarakat di Jawa Timur Meningkatkan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik dengan pemanfaatan teknologi informasi (e-gov)	Kabupaten Nganjuk		150.000.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	53.960.000,00	Kab. Nganjuk, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	PP7 - Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi Masyarakat di Jawa Timur Meningkatkan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik dengan pemanfaatan teknologi informasi (e-gov)	Kabupaten Nganjuk		75.000.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
2.	**5.02.04**	**PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH**	***Jumlah Wajib Pajak yang membayar tepat waktu*** ***Jumlah Wajib Pajak Baru*** ***Persentase realisasi pajak daerah*** ***Persentase realisasi retribusi daerah yang dikelola***	**997600 WP** **100 %** **100 %** **388500 WP**			**667000 WP** **2000 WP** **100 %** **100 %**	**3.824.196.800,00**						**992700 WP** **100 %** **100 %** **388000 WP**	**5.195.000.000,00**	
	5.02.04.2.01	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	*Jumlah Wajib Pajak Baru* *Jumlah Wajib Pajak yang Membayar Tepat Waktu* *Prosentase Realisasi Pajak Daerah* *Prosentase Realisasi Retribusi Daerah yang dikelola*	-			2000 Wajib Pajak 667000 Wajib Pajak 100 % 100 %	3.824.196.800,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	PP7 - Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi Masyarakat di Jawa Timur Meningkatkan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik dengan pemanfaatan teknologi informasi (e-gov)	Kabupaten Nganjuk	-	5.195.000.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.04.2.01.0001	Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Pajak Daerah				3 Dokumen	150.000.000,00	Kab. Nganjuk, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	PP7 - Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi Masyarakat di Jawa Timur Meningkatkan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik dengan pemanfaatan teknologi informasi (e-gov)	Kabupaten Nganjuk		250.000.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.04.2.01.0002	Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah														
			Jumlah Dokumen Hasil Analis Pajak Daerah serta Pengembangan Pajak Daerah dan Kebijakan Pajak Daerah				1 Dokumen	150.000.000,00	Kab. Nganjuk, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	PP7 - Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi Masyarakat di Jawa Timur Meningkatkan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik dengan pemanfaatan teknologi informasi (e-gov)	Kabupaten Nganjuk		150.000.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.04.2.01.0003	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah				12 Laporan	150.000.000,00	Kab. Nganjuk, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	PP7 - Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi Masyarakat di Jawa Timur Meningkatkan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik dengan pemanfaatan teknologi informasi (e-gov)	Kabupaten Nganjuk		350.000.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.04.2.01.0004	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah														
			Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah				25 Unit	439.196.800,00	Kab. Nganjuk, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	PP7 - Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi Masyarakat di Jawa Timur Meningkatkan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik dengan pemanfaatan teknologi informasi (e-gov)	Kabupaten Nganjuk		550.000.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.04.2.01.0005	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subjek Pajak dan Wajib Pajak Daerah				12 Laporan	400.000.000,00	Kab. Nganjuk, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	PP7 - Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi Masyarakat di Jawa Timur Meningkatkan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik dengan pemanfaatan teknologi informasi (e-gov)	Kabupaten Nganjuk		500.000.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.04.2.01.0006	Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah														
			Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah				2 Laporan	200.000.000,00	Kab. Nganjuk, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	PP7 - Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi Masyarakat di Jawa Timur Meningkatkan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik dengan pemanfaatan teknologi informasi (e-gov)	Kabupaten Nganjuk		550.000.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.04.2.01.0007	Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Objek Pajak yang Disesuaikan NJOP nya				3.000 Obyek Pajak	150.000.000,00	Kab. Nganjuk, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	PP7 - Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi Masyarakat di Jawa Timur Meningkatkan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik dengan pemanfaatan teknologi Informasi (e-gov)	Kabupaten Nganjuk		350.000.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.04.2.01.0008	Penetapan Wajib Pajak Daerah														
			Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah				24 Dokumen	220.000.000,00	Kab. Nganjuk, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	PP7 - Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi Masyarakat di Jawa Timur Meningkatkan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik dengan pemanfaatan teknologi informasi (e-gov)	Kabupaten Nganjuk		250.000.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.04.2.01.0009	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Layanan dan Konsultasi Pajak Daerah				35000 Layanan	115.000.000,00	Kab. Nganjuk, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	PP7 - Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi Masyarakat di Jawa Timur Meningkatkan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik dengan pemanfaatan teknologi informasi (e-gov)	Kabupaten Nganjuk		115.000.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.04.2.01.0010	Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah														
			Jumlah Data Pelaporan Pajak Daerah yang Telah Dilakukan Penelitian dan Verifikasi				12 Dokumen	1.200.000.000,00	Kab. Nganjuk, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	PP7 - Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi Masyarakat di Jawa Timur Meningkatkan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik dengan pemanfaatan teknologi informasi (e-gov)	Kabupaten Nganjuk		1.350.000.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.04.2.01.0011	Penagihan Pajak Daerah														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penagihan Pajak Daerah				12 Dokumen	350.000.000,00	Kab. Nganjuk, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	PP7 - Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi Masyarakat di Jawa Timur Meningkatkan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik dengan pemanfaatan teknologi informasi (e-gov)	Kabupaten Nganjuk		350.000.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.04.2.01.0012	Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah														
			Jumlah Dokumen Hasil Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah				12 Dokumen	50.000.000,00	Kab. Nganjuk, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	PP7 - Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi Masyarakat di Jawa Timur Meningkatkan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik dengan pemanfaatan teknologi informasi (e-gov)	Kabupaten Nganjuk		70.000.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.04.2.01.0013	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Hasil Pemeriksaan serta Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah				12 Dokumen	100.000.000,00	Kab. Nganjuk, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	PP7 - Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi Masyarakat di Jawa Timur Meningkatkan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik dengan pemanfaatan teknologi informasi (e-gov)	Kabupaten Nganjuk		200.000.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.04.2.01.0015	Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah														
			Jumlah Laporan Perkembangan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah				12 Laporan	150.000.000,00	Kab. Nganjuk, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	PP7 - Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi Masyarakat di Jawa Timur Meningkatkan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik dengan pemanfaatan teknologi informasi (e-gov)	Kabupaten Nganjuk		160.000.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	JUMLAH							16.044.177.305,00							23.134.216.938,00	

BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Dalam rangka mendukung prioritas pembangunan daerah tahun 2024 dan pencapaian target tujuan dan sasaran Perangkat Daerah sebagaimana yang ditetapkan dalam Renstra Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2024-2026, serta sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah dirumuskan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Tahun 2024. Selain itu, juga untuk mendukung pelayanan Perangkat Daerah dalam melaksanakan urusan pemerintahan unsur penunjang

Tabel 4.1
Prioritas Pembangunan Daerah

No.	Prioritas Daerah	Alokasi (2024)
	Proporsi Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Pendapatan Daerah	16.044.177.305

Tabel 4.2
Sasaran Perangkat Daerah

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Target (2024)	Alokasi (2024)
	Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Prosentase kenaikan Pendapatan Asli daerah (PAD)	18%	16.044.177.305

Tabel 4.3
Program/Kegiatan/Sub Kegiatan dan Pendanaan Tahun 2024

NO	Urusan/Program/Kegiatan/Subkegiatan	Indikator Kinerja		PAGU
		URAIAN (Output)	Target	
	5	6	8	9
i	**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**	**Nilai Sakip SKPD**	A (80)	12.219.980.505,00
1	**Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi yang selesai**	13 dok	**35.365.100,00**
1.1	Sub Kegiatan Perencanaan Daerah	**Jumlah Laporan Perencanaan, yang selesai**	**6** dok	15.381.300
1.2	SubKegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	**Jumlah Dokumen Evaluasi yang selesai**	7 lap	19.983.800
2	**Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Jumlah Laporan Keuangan yang selesai**	71 Dokumen	9.825.341.255
2.1	SubKeg. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	45 orang	5.480.000
2.2	SubKeg. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah laporan keuangan akhir tahun yang disusun	1 Laporan	49.952.000
2.3	SubKeg. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah laporan keuangan,bulanan,triwulan, semesteran Perangkat Daerah yang disusun	25 Laporan	19.338.000
3	**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**Jumlah Dokumen Administrasi Barang Milik Daerah yang dilaksanakan**	1 dok	19.338.000
3.1	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan penatausahaan barang milik daerah	15 lap	19.338.000
4	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Laporan Tingkat kehadiran ASN**	12 lap	199.685.5000
4.1	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Pakaian Dinas beserta atributnya	44 Orang	35.200.000
4.2	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah dokumen pendataan dan pengolahan administrasi kepegawaian	12 Dokumen	4.961.500
4.3.	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	63 Orang	159.524.000
5	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Jumlah Laporan administrasi umum yang dilaksnakan**	12 Laporan	566.665.500
5.1	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	90 Paket	150,000,000
5.2	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	jumlah paket bahan logistik Kantor Bapenda	60 Paket	74.999.500
5.3	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	118,096 Paket	46.998.900
5.4	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah bahan bacaan yang tersedia	1,120 Dokumen	4.200.000
5.5	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	9.970.000
5.6	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	205.519.000
5.7	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	12 Dokumen	74.978.100
6	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Jumlah pengadaan Barang Milik Daerah yang diadakan**	2 Laporan	381.534.650
6.1	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah unit Kendaaan dinas operasional atau lapangan yg disediakan		
6.2	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit kendaraan dinas operasional atau lapangan yang disediakan		
.6.3	Pengadaan Mebel	Jumlah mebeleur yang diadakan	50 Unit	109.187.250
6.4	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah pengadaan peralatan dan mesin kantor yang di adakan	10 unt	272.347.400

7	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Jumlah Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dilaksanakan**	3	Jasa	715.179.600
7.1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12	Laporan	5.000.000
7.2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12	Laporan	189.000.000
7.3	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12	Laporan	521.179.600
8	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Barang Milik Daerah yang dipelihara**	52	unit	418.438.900
8.1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan dinas yang terpelihara	19	unit	235.978.900
8.2	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Meubeleur yang dipelihara	10	unit	3,500,000
8.3	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipeliharat	22	unit	125,000,000
8.4	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor yangterpelihara	1	Unit	53.960.000
II	**PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH**	**Jumlah Wajib Pajak yang membayar tepat Waktu**	667,000.00	WP	3.824.196.800
		Jumlah Wajib Pajak Baru	2,000.00	WP	
		Prosentase Realisasi Pajak Daerah	100	%	
		Prosentase Realisasi Retribusi Daerah yang dikelola	100	%	
1	**KEGIATAN PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH**	**Jumlah Wajib Pajak yang membayar tepat Waktu**	667,000.00	WP	3.824.196.800
		Jumlah Wajib Pajak Baru	2,000.00	WP	
		Prosentase Realisasi Pajak Daerah	100	%	
		Prosentase Realisasi Retribusi Daerah yang dikelola	100	%	
1.1	Perencanaan pengelolaan pajak daerah	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Pajak Daerah	3	Dokumen	150.000.000
1.2	Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Analis Pajak Daerah serta Pengembangan Pajak Daerah dan Kebijakan Pajak Daerah	1	Dokumen	150.000.000
1.3	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	12	Laporan	150.000.000
1.4	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	25	Unit	439.196.800
1.5	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subjek Pajak dan Wajib Pajak Daerah	12	Laporan	400.000.000
1.6	Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	2	Laporan	200.000.000

1.7	Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	Jumlah Objek Pajak yang Disesuaikan NJOP nya	3,000 OP	150.000.000
1.8	Penetapan Wajib Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah	24 Dokumen	220.000.000
1.9	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Jumlah Layanan dan Konsultasi Pajak Daerah	35,000 Layanan	115,000,000
1.1	Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	Jumlah Data Pelaporan Pajak Daerah yang Telah Dilakukan Penelitian dan Verifikasi	12 Dokumen	1.200.000.000
1.11	Penagihan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penagihan Pajak Daerah	12 Dokumen	350.000.000
1.12	Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	12 Dokumen	50.000.000
1.13	Pengendalian, pemeriksaan dan Pengawasan pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pemeriksaan serta Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah	12 Dokumen	100.000.000
1.15	Elektronifikasi Transaksi Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Perkembangan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah	12 laporan	150,000,000
	JUMLAH TOTAL			**16.044.177.305**

BAB V
P E N U T U P

Rencana Kerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2024 disusun dengan mengacu pada sasaran dan prioritas pembangunan Daerah, program dan kegiatan, indikator dan target kinerja serta pagu indikatif Perangkat Daerah sebagaimana tercantum dalam RKPD Kabupaten Nganjuk Tahun 2024.

Dalam pelaksanaan tahun berjalan Rencana Kerja Tahun 2024 apabila terdapat ketidaksesuaian dengan hal-hal sebagaimana tercantum dalam RKPD Kabupaten Nganjuk Tahun 2024, akan dilakukan penyesuaian-penyesuaian dalam bentuk Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah dengan tetap berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

5.1. Kaidah-kaidah Pelaksanaan

Rencana Kerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2024, merupakan perencanaan tahunan yang sifatnya lebih operasional dan mempunyai yang strategis yaitu menjembatani antara perencanaan pada Perangkat Daerah dengan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD), sebagai implementasi pelaksanaan strategis jangka menengah (RPJMD) daerah dan Renstra Perangkat Daerah yang menjadi satu kesatuan untuk mendukung pencapaian Visi dan Misi Daerah Kabupaten Nganjuk.

Untuk itu, dalam rangka menjaga kesinambungan pencapaian tujuan dan sasaran Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk, menetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut:

1. Seluruh unit kerja pada Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk secara bersama-sama mempunyai tanggung jawab untuk:
   a. melaksanakan Rencana Kerja Badan Pendapatan DaerahTahun 2024 dengan sebaik-baiknya sesuai tugas dan kewenangannya; dan
   b. menjaga konsistensi antara RKPD, Rencana Kerja Badan Pendapatan Daerah dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran.

2. Dalam rangka efektivitas pelaksanaannya akan dilakukan pemantauan dan evaluasi kinerja secara berkala terhadap pelaksanaan Rencan Kerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2024; dan
3. Rencana Kerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2024 mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, adapun langkah-langkah persiapan dimulai sejak tanggal ditetapkan hingga pelaksanaannya memperhatikan dan menerapkan prinsip-prinsip koordinasi, sinkronisasi, sinergitas, harmonisasi, efektivitas dan efesiensi dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di Kabupaten Nganjuk.

5.2. Rencana Tindak Lanjut

Dengan ditetapkannya Rencana Kerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2024, maka akan dipergunakan sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah dengan berpedoman pada Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara sebagai rangkaian penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BUPATI NGANJUK,

ttd.

MARHAEN DJUMADI

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM

SUTRISNO, S.H., M.Si.
Pembina
NIP. 19680501 199202 1 001

b. Format Berita Acara Kesepakatan Hasil Forum Perangkat Daerah Renja Dinas/Badan Tahun 2024

BERITA ACARA
KESEPAKATAN HASIL FORUM PERANGKAT DAERAH RENJA
BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN NGANJUK
KABUPATEN NGANJUK TAHUN 2024
NOMOR 050/ 45 /411.403/2023

Pada hari Selasa tanggal tujuh bulan Pebruari tahun Dua ribu dua puluh tiga telah diselenggarakan Forum Perangkat Daerah Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Nganjuk yang dihadiri pemangku kepentingan sesuai dengan daftar hadir sebagaimana tercantum dalam LAMPIRAN I berita acara ini.

Setelah memperhatikan, mendengar dan mempertimbangkan :

1. Pemaparan materi Renja 2024 Badan Pendapatan Daerah Tahun 2024 – 2026 oleh Plt Kepala Bapenda Kabupaten Nganjuk
2. Tanggapan dan saran dari seluruh peserta forum Perangkat Daerah Badan Pendapatan Daerah terhadap materi yang dipaparkan oleh masing-masing ketua kelompok diskusi sebagaimana telah dirangkum menjadi hasil keputusan kelompok diskusi, maka pada:

Hari dan Tanggal	:	Selasa, tanggal 7 Pebruari 2023
Jam	:	09.00 Wib
Tempat	:	Ruang Rapat Bapenda Kabupaten Nganjuk

Forum Perangkat Daerah Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2023

MENYEPAKATI

KESATU	:	Menyepakati program dan kegiatan prioritas, dan indikator kinerja yang disertai target dan kebutuhan pendanaan, yang telah diselaraskan dengan usulan kegiatan prioritas dari forum Perangkat Daerah Badan Pendapatan Daerah;
KEDUA	:	Menyepakati rancangan Renja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam LAMPIRAN II berita acara ini;
KETIGA	:	Menyepakati berita acara ini beserta lampirannya (LAMPIRAN I,II) merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari berita acara hasil kesepakatan Forum Perangkat Daerah Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Nganjuk ini; dan
KEEMPAT	:	Berita acara ini beserta lampirannya dijadikan sebagai bahan penyempurnaan rancangan RKPD Kabupaten Nganjuk Tahun 2024

Demikian berita acara ini dibuat dan disahkan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Nganjuk, 7 Pebruari 2024

Plt. KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH
KEPALA DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
KABUPATEN NGANJUK
Selaku pimpinan sidang Forum Perangkat Daerah

NAFHAN TOHAWI, SH, MH
Pembina Utama Muda
NIP. 19721208 199803 1 005

Mewakili Peserta Forum Perangkat Daerah penyusunan Renja Badan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Nganjuk Kabupaten Nganjuk

No.	Nama	Lembaga/Instansi	Jabatan	Alamat	Tanda Tangan
1	BASORI	DPRD	ketua		1
2	AGUNG WIDIANTO	Bappeda			2
3	Dwi Tanti	Inspektorat			3
4	SOHANSYAH	Kecamatan Rejoso	camat		4
5	ERFIH S	OPD Penghasil DISPERINDAG	Kabid		**5**
6	SUJITO	Satpol PP			6
7	Drs. Pudjianto	Tokoh Masyarakat			7
8	Drs. Siswo Adie	Akademis			8

a) Format Daftar Hadir Peserta Forum Perangkat Daerah Renstra Perangkat Daerah

LAMPIRAN I

BERITA ACARA HASIL KESEPAKATAN FORUM
PERANGKAT DAERAH PENYUSUNAN RENSTRA
PERANGKAT DAERAH BADAN PENDAPATAN
DAERAH KABUPATEN NGANJUK TAHUN 2024

Nomor : 050/45/411.403/2023
TANGGAL : 7 Pebruari 2023

DAFTAR HADIR PESERTA FORUM PERANGKAT DAERAH
BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN NGANJUK

Tanggal : 7 Pebruari 2023
Tempat : Ruang rapat Bapenda Kabupaten Nganjuk

No.	Nama	Lembaga/Instansi	Alamat	No. Tlp.	Tanda Tangan
1	Rahkan Tohari	Bapenda			1
2	Pujianto				2
3	Agung w,	Bappeda			3
4	k. Dana sari	Bapenda	Jl. Merdeka, Ngjk		4
5	BASTORO.				5
6	SUKIRNO	Bawaslu	Bawaslu		6
7					7
8	Lilik Suhari	Bapenda			8
9	SUYADI	— " —			9
10	ITSNA S	DINAS PORABUDPAR.			10
11	Sri wahyuni	Bapenda			11
12	Joni Bgrmy	— —			12
13	ACHMO	"			13
14	Rolly K.	— " —			14
15	Imam W	— —			15
16	Kashmi	Bapenda			16
17	Sujito	POL PP			17
18	Agus Bgn S				18
19	Danarko	T. Anom			19
20	Hj. Dwi Retno	DPRD.			20
21	ERNI PUENAMI	DPRD			21
22	R. BAMBANG. A.H.W	SEK. KOM. 2.			22
23	M. Alin	TU KOM 2			23
24	Samsun	BPKAD			24
25	Bambang H	Dukcapil			25

No.	Nama	Lembaga/Instansi	Alamat	No. Tlp.	Tanda Tangan
26	Hanang prijono	Bapenda.			26
27	Dwi Agus S	"			27
28	Hetty E	"			28
29	Wahyudi S	"			29
30	Tri Canggo T	"			30
31	Faima	"			31
32	Dwi Tanti	Inspektorat			32
33	Armila M.K	"			33
34	Erfin	Disperindag			34
35	Sigit	Bapenda.			35
36	Lis pratya	"			36
37	Binti Rahma	"			37
38	Sri yanti	"			38
39	Johansyah S	Kec. Rejoso			39
40	Nawang S	Bapenda.			40
41	A. Andad alan	"			41
42	Della	"			42
43	Luharani	"			43
44	Yuli Candra	"			44
45	Dwi Murhayanti	"			45
46	Varrel Zakii.K	"			46
47	Okky Rio	"			47
48	Suprapto	"			48
49	Sulistati	"			49
50					50
51					51
52					52
53					53
54					54

Petugas absensi.

Dwi Murhayanti

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2024
Dan Prakiraan Maju Tahun 2025 Kabupaten Nganjuk

Program/Kegiatan/Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ SubKegiatan (output)	Target Kinerja		Pagu	
		Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2024	Tahun 2025
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	**Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Pelayanan pajak daerah**	85 %	85.25 %	17,484,110,344.00	18,066,315,500.00
	Nilai Sakip SKPD	A (90)	A (90)		
Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	**Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi yang selesai**	13 dok	13 dok	28,000,000	30,000,000
Sub Kegiatan Perencanaan Daerah	Dokumen Perencanaan, yang selesai	**6** dok	**6** dok	***10,000,000***	***10,000,000***
SubKegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen Evaluasi yang selesai	7 dok	7 dok	18,000,000	20,000,000
Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	**Laporan Keuangan yang selesai**	42 Dokumen	42 Dokumen	15,056,518,250	15,373,483,250
SubKeg. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah pembayaran Gaji dan Tunjangan ASN	23 dokumen	23 dokumen	14,989,018,250	15,294,983,250
SubKeg. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah laporan keuangan akhir tahun yang disusun	1 Laporan	1 Laporan	7,500,000	8,500,000
SubKeg. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah laporan keuangan,bulanan,triwulan, semesteran Perangkat Daerah yang disusun	18 Laporan	18 Laporan	60,000,000	70,000,000
Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	**Dokumen Administrasi Barang Milik Daerah yang dilaksanakan**	1 dok	1 dok	8,500,000	10,000,000
Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah dokumen penatausahaan barang milik daerah	1 dok	1 dok	8,500,000	10,000,000
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	**% ASN yang hadir dan pulang tepat waktu**	100 %	100 %	206,000,000	208,000,000
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta atributnya	48 Orang	48 Orang	28,000,000	30,000,000
Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah dokumen pendataan dan pengolahan administrasi kepegawaian	12 Dokumen	12 Dokumen	8,000,000	8,000,000
Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah aparatur yang mengikuti pelatihan berdasarkan tugas dan fungsi	44 Orang	44 Orang	170,000,000	170,000,000
Administrasi Umum Perangkat Daerah	**Jumlah Laporan administrasi umum yang dilaksnakan**	12 Laporan	12 Laporan	494,700,000	520,400,000
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	90 Paket	100 Paket	150,000,000	150,000,000
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah paket bahan logistik Kantor Bapenda	60 Paket	60 Paket	75,000,000	80,000,000
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	118,096 Lembar	118,096 Lembar	50,000,000	60,000,000
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah bahan bacaan yang tersedia	1,120 Eks	1,120 Eks	5,400,000	5,400,000
Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	12 Laporan	9,300,000	10,000,000
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	12 Laporan	130,000,000	135,000,000
Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	12 Dokumen	12 Dokumen	75,000,000	80,000,000
Dukungan pelaksanaan sistem pemerintah berbasis Elektronik Pada SKPD	Jumlah Laporan Perkembangan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah	4 Laporan	4 Laporan	150,000,000	150,000,000
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	**Jumlah pengadaan Barang Milik Daerah yang diadakan**	10 unit	5 unit	440,000,000	650,000,000
Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah unit Kendaaan dinas operasional atau lapangan yg disediakan		1 unit		350,000,000
Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit kendaraan dinas operasional atau lapangan yang disediakan	**1** unit		60,000,000	
Pengadaan Mebel	Jumlah mebeleur yang diadakan	20 unit meja/kursi		110,000,000	
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah pengadaan peralatan dan mesin kantor yang di adakan	10 unt	5 unt	270,000,000	300,000,000
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Jumlah Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dilaksanakan**	3 jasa	3 jasa	891,932,250	891,932,250
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	12 Laporan	5,000,000	5,000,000
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	194,400,000	194,400,000
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	692,532,250	692,532,250
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Barang Milik Daerah yang dipelihara**	52 unit	52 unit	358,459,844	382,500,000

Program/Kegiatan/Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ SubKegiatan (output)	Target Kinerja		Pagu	
		Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2024	Tahun 2025
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan dinas yang terpelihara	19 unit	19 unit	180,000,000	190,000,000
Pemeliharaan Mebel	Jumlah Meubeleur yang dipelihara	10 unit	10 unit	3,500,000	2,500,000
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipeliharat	22 unit	22 unit	125,000,000	150,000,000
Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor yangterpelihara	1 gedung	1 gedung	49,959,844	40,000,000
PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	**Jumlah Wajib Pajak yang membayar tepat Waktu**	667,000.00 WP	992,700.00 WP	4,311,000,000	4,645,000,000
	Jumlah Wajib Pajak Baru	2,000.00 WP	386,000.00 WP		
	Prosentase Realisasi Pajak Daerah	100.00 %	100.00 %		
	Prosentase Realisasi Retribusi Daerah yang dikelola	100.00 %	100.00 %		
KEGIATAN PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	**Jumlah Wajib Pajak yang membayar tepat Waktu**	667,000.00 WP	992,700.00	4,311,000,000	4,645,000,000
	Jumlah Wajib Pajak Baru	2,000.00 WP	386,000.00 WP		
	Prosentase Realisasi Pajak Daerah	100.00 %	100.00 %		
	Prosentase Realisasi Retribusi Daerah yang dikelola	100.00 %	100.00 %		
Perencanaan pengelolaan pajak daerah	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Pajak Daerah	3 Dokumen	3 Dokumen	250,000,000	250,000,000
Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Analis Pajak Daerah serta Pengembangan Pajak Daerah dan Kebijakan Pajak Daerah	1 Dokumen	1 Dokumen	250,000,000	300,000,000
Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	12 Laporan	12 Laporan	350,000,000	350,000,000
Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	25 Jenis	25 Jenis	500,000,000	550,000,000
Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subjek Pajak dan Wajib Pajak Daerah	12 Laporan	12 Laporan	200,000,000	200,000,000
Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	2 Laporan	2 Laporan	270,000,000	270,000,000
Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	Jumlah Objek Pajak yang Disesuaikan NJOP nya	3,000 OP	3,000 OP	300,000,000	350,000,000
Penetapan Wajib Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah	24 Dokumen	24 Dokumen	250,000,000	250,000,000
Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Jumlah Layanan dan Konsultasi Pajak Daerah	35,000 Layanan	35,000 Layanan	115,000,000	115,000,000
Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	Jumlah Data Pelaporan Pajak Daerah yang Telah Dilakukan Penelitian dan Verifikasi	12 Dokumen	12 Dokumen	1,000,000,000	1,200,000,000
Penagihan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penagihan Pajak Daerah	12 Dokumen	12 Dokumen	416,000,000	350,000,000
Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	12 Dokumen	12 Dokumen	70,000,000	70,000,000
Pengendalian, pemeriksaan dan Pengawasan pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pemeriksaan serta Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah	12 Dokumen	12 Dokumen	150,000,000	200,000,000
Pembinaan dan pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah	12 Dokumen	12 Dokumen	30,000,000	30,000,000
Elektronifikasi Transaksi Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Perkembangan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah	12 laporan	12 Dokumen	160,000,000	160,000,000
JUMLAH TOTAL				21,795,110,344	22,711,315,500

Nganjuk, 7 Pebruari 2023

Daftar Anggota Sidang Kelompok . peningkatan pendapatan asli daerah
Forum Perangkat Daerah **RENJA** **Badan** Pendapatan Daerah Kabupaten
Nganjuk Tahun 2024

No.	Nama	Lembaga/Instansi	Jabatan	Alamat	Tanda Tangan
1	BASORI	DPRD	Ketua		1
2	AGUS WINDARTO	Bappeda			2
3	DWI TANTI	Inspektorat			3
4	JOHANSYAH. S	Kecamatan Kejoso	Camat		4
5	ERFIN J	OPD Penghasil DISPERINDAG	Kabid		5
6	SUJITO	Satpol PP	Kabid		6
7	Drs. Pudjianto	Tokoh Masyarakat	-		7
8	Drs. Siswo Adie	Akademis			8

Nganjuk, 7 Pebruari 2023

Daftar Anggota Sidang Kelompok . peningkatan pendapatan asli daerah
Forum Perangkat Daerah **RENJA** Badan Pendapatan Daerah Kabupaten
Nganjuk Tahun 2024

No.	Nama	Lembaga/Instansi	Jabatan	Alamat	Tanda Tangan
1	BASORI	DPRD	Ketua		1
2	AGUNG WINDARTO	Bappeda			2
3	DWI TANTI	Inspektorat			3
4	JOHANSYAH. S	Kecamatan Kejoso	Camat		4
5	ERFIN J	OPD Penghasil DISPERINDAG	Kabid		5
6	SUJITO	Satpol PP	Kabid		6
7	Drs. Pudjianto	Tokoh Masyarakat	—		7
8	Drs. Siswo Adie	Akademis			8

Saran/Rekomendasi Sidang Kelompok

No.	Saran/Rekomendasi Sidang Kelompok
SESI I	
1.	DARI DPRD KOMISI II (Bp Basori)
	- Peningkatan Pendapatan di Kabupaten Nganjuk dengan menggali potensi lagi
	- disarankan dalam penggalian potensi bisa menggunakan pihak ketiga apabila kekurangan tenaga, seperti tenaga dari universitas
	- Pada tahun 2024 diharapkan bisa mendapatkan data potensi yang ada
	TANGGAPAN
	- Dalam penggalian potensi bapenda merencanakan kerjasama dengan Satpol PP, DPMPTSP, Indag
2	DARI DisParBudPar (Ibu Isna)
	- Untuk peningkatan PAD melaksanakan kerjasama dengan pihak ke III seperti Slumbung, even the carnival
	- Akan menggunakan E-Tiketing untuk Kolam Renang Sri Tanjung, Tral, Sedudo dan Roro kuning tapi terkendala dengan sinyal
	TANGGAPAN
	Kendala terkait sinyal nanti kerjasan dengan Infokom
3	DARI Satpol PP (Bp Sujito)
	- Satpol PP untuk penggalian Potensi agar dilibatkan seperti pengendalian untuk penunggak Pajak
	- Untuk reklamasi terkait galian galian C jangan diakhir pelaksanaan
	- Untuk Pajak Hiburan masih banyak café, karaoke yang tidak membayar pajak
	- Pajak Parkir : parkir telah dikenakan parker berlangganan akan tetapi pada lokasi tertentu masih kena parkir sehingga terdapat dobel pengenaan
	TANGGAPAN
	- Dalam pengendalian pajak Satpol PP akan dilibatkan baik untuk penunggak pajak, penertiban papan reklame, tempat hiburan maupun pajak lainnya
	- Galian C Bapenda tidak punya kewenangan untuk pemberian ijinnya,
	- Untuk pengusaha hotel restoran akan diagendakan acara ngopi bareng bersama Bupati dan pengusaha hotel, restoran guna saling membantu antara pengusaha hotel restoran dengan Pemerintah Kabupaten Nganjuk sehingga dapat meningkatkan penerimaan Pajak hotel restoran
	- Melaksanakan Pendataan pada malam hari karena maraknya café, warung yang hanya pada malam hari sehingga bisa mengkatkan potensi Pajak Restoran
	- Parkir berlangganan merupakan Retribusi parkir, sedangkan untuk parkir tempat tertentu merupakan pajak parkir
SESI II	
1	DARI TOKOH MASYARAKAT (Bp Pudjianto)
	- Meningkatkan PAD dengan mengenakan parkir di lingkungan Sekolah, dan juga untuk menaikan parkir di luwes dari 500 menjadi 1000 sehingga bisa dikenakan pajak parkir

	- Untuk membentuk Tim yang bertugas mengecek perubahan status tanah dari kosong menjadi ada bangunannya, dari bangunan yang biasa menjadi bangunan yang lebih bagus
	- Untuk pajak restoran supaya dikembangkan seperti Rumah makan Brodin yang taat dan patuh pajak
	TANGGAPAN
	- Sudah ada SK TIM Pemuthakiran Data
2	Dari Diperindag (Bp Arifin J)
	- Ucapan terima kasih dengan adanya Sistem E Setoran yg dibangun Bapenda yg memudahkan penyetoran Retribusi dan pemantauan pemasukan retribusi di tiap tiap pasar dan untuk selanjutnya dimohon untuk Integrasi antara aplikasi E Retribusi yang dibangun oleh Bank Jatim dengan E Setoran
	- Raperda Pajak dan Retribusi untuk segera diselesaikan sehingg bisa menyesuaikan tariff retribusi
	- Insentif Retribusi untuk bisa dicairkan untuk memberikan motivasi kepada petugas
	TANGGAPAN
	- Untuk Integrasi Sistem akan dikoordinasikan dengan Bank Jatim, untuk Raperda Pajak dan Retribusi masih si proses di DPRD
	- Untuk pemberian Insentif terkendala dengan adanya Perbup tentang TPP
3	DARI KECAMATAN REJOSO (Bp Johansyah),KECAMATAN KERTOSONO DAN KECAMATAN SAWAHAN
	- Pemberian reward untuk ditambah
	- Untuk dikembangkan Sistem yang dapat mengetahui jumlah pajak yang sudah terbayar dan belum terbayar
	- Proses Validasi BPHTB untuk dipercepat jangan sampai bulanan
	- Upah Edar/Upah pungut jangan diberikan pada akhir anggaran karena berakibat tidak bisa terserap semua
	- Untuk penunggak pajak apakah tidak ada kebijakan penghapusan pajak seperti Waterpark
	TANGGAPAN
	- Untuk reward pelunasan PBB akan diusahan ditambah apabila ada anggarannya
	- Proses validasi BPHTB di Bapenda 1 hari sudah selesai setelah SSPD dikirim ke Bapenda,
	- Untuk upah edar/upah pungut tidak ada dalam nomeklatur sehingga untuk dibuatkan kegiatan dan mengenai realisasi tergantung Kecamatan ditempakan pada tribulan berapa
	- E-SPPT Sistem ini disediakan untuk Wajib Pajak PBB-P2 yang ingin mengetahui besaran tagihan PBB-P2 tahun berkenaan maupun tahun sebelumnya sudah dibayar atau belum, dengan cara memasukan Nomor Obyek Pajaknya. Selain itu aplikasi ini disediakan bagi perangkat desa yang akan menyetorkan penerimaan PBB-P2 secara kolektif sampai keluar kode bayar sebagai dasar penyetoran ke rekening penerimaan di bank Jatim.
	- Untuk waterpark sudah ada kesepakatan pembayaran PBB apabila sudah laku

Lampiran II : Surat Kepala Bappeda Kabupaten Nganjuk
Nomor : 005/61/411.401/2023
Tanggal : 27 Juli 2023

LAPORAN TINDAK LANJUT ATAS REKOMENDASI HASIL REVIU RANCANGAN AKHIR RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024 OLEH APIP

NAMA PERANGKAT DAERAH : BADAN PENDAPATAN DAERAH

NO	REKOMENDASI	TINDAK LANJUT		HALAMAN	KETERANGAN
		YA	TIDAK		
1	Melengkapi Dokumen Rankir Renja dengan Berita Acara Forum Perangkat Daerah Bapenda	√			Terdapat Berita Acara Forum Perangkat Daerah Bapenda Renja 2024
2	Menyelaraskan Rumusan Target Sasaran Perangkat Dearah pada Rancangan Akhir Renja BAB III dan IV Tahun 2024 dengan mengacu pada target Ssaran BAB IV Rencana strategis Bapenda Tahun 2024-2026	√		48	Telah disesuaikan Rumusan Target Sasaran Perangkat Dearah pada Rancangan Akhir Renja BAB III dan IV Tahun 2024 dengan mengacu pada target Ssaran BAB IV Rencana strategis Bapenda Tahun 2024-2026
3	Menyempurnakan Bab II Rancangan Akhir Renja Tahun 2024 Bapenda agar dapat menjelaskan keterhubungan antara program dan kegiatan dengan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi perangkat daerah sebagai langkah untuk mengatasi/menyelesaikan isu-isu yang ditetapkan dapat berupa bentuk tabel	√		44	Telah disesuaikan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi perangkat daerah sebagai langkah untuk mengatasi/menyelesaikan isu-isu yang ditetapkan dapat berupa bentuk tabel
4	Menyempurnakan Penulisan angka pada sub BAB yang masih belum sesuai di beberapa halaman agar disesuaikan dengan sistematika penulisan Dokumen Renja Badan Pendapatan Daerah tahun 2024	√			Telah disesuaikan Penulisan angka pada sub BAB yang masih belum sesuai di beberapa halaman agar disesuaikan dengan sistematika penulisan Dokumen Renja Badan Pendapatan Daerah tahun 2024

Nganjuk, 31 Juli 2023

KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH
KABUPATEN NGANJUK

Dra. WIDYASTI SIDHARTINI, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19640612 199003 2 010